LAPORAN KINERJA

DISPUSIP
Kabupaten Tanah Laut

LKj 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

#DISPUSIPTALA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, capaian kinerja sasaran strategis, serta pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

Dengan tersusunnya Laporan kinerja ini diharapkan pula menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten tanah laut untuk meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan melaksanakan misi yang ditetapkan. Selanjutnya laporan ini juga menjadi masukan dan bahan penilaian bagi Bupati Tanah Laut

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat.

Pelaihari, Februari 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanah Laut

SAFARIN, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690426 199010 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut, yaitu "Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan". Dalam pelaksanaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut berperan strategis dalam peningkatan literasi masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan kearsipan yang profesional dan akuntabel, dengan sasaran strategis berupa meningkatnya kegemaran membaca masyarakat dan pengelolaan kearsipan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh anggaran sebesar Rp9.968.328.528,93 yang dialokasikan melalui Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan peningkatan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan nilai pengawasan kearsipan daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya juga telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, pemantauan capaian kinerja secara berkala, serta perbaikan perjanjian kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, ke depan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut akan terus melakukan perbaikan dan inovasi guna meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi.

Pelaihari, Februari 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanah Laut

SAFARIN, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690426 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

C. DASAR HUKUM 3

D. Cascading Kinerja 4

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi 4

F. Isu Strategis Perangkat Daerah 12

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran 15

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya 18

I. Sistematika Penyajian 20

BAB II 22

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 22

A. Visi RPJMD 22

B. Misi RPJMD 23

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 24

D. Strategi dan Arah Kebijakan 27

E. Perjanjian Kinerja 33

BAB III 36

AKUNTABILITAS KINERJA 36

A. AKUNTABILITAS KINERJA 37

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 89

BAB IV 92

PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Strategi Peningkatan Kinerja 92

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.

b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

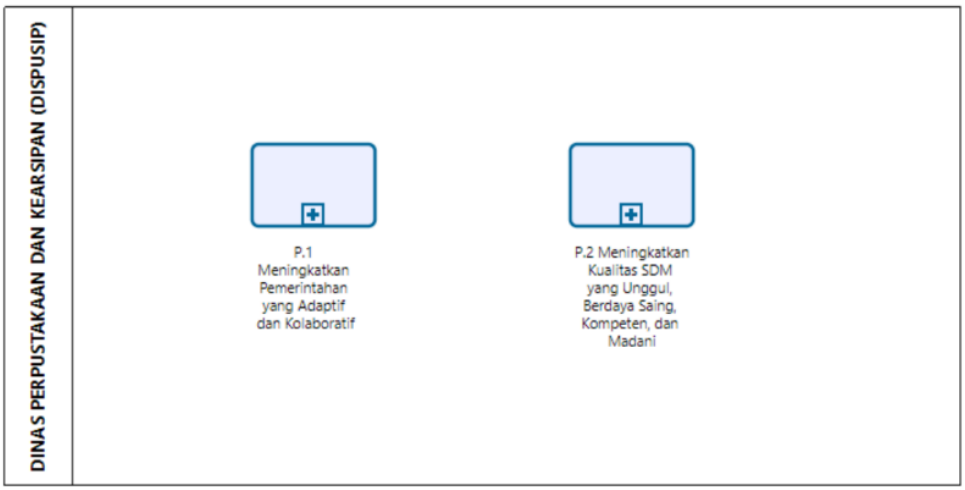

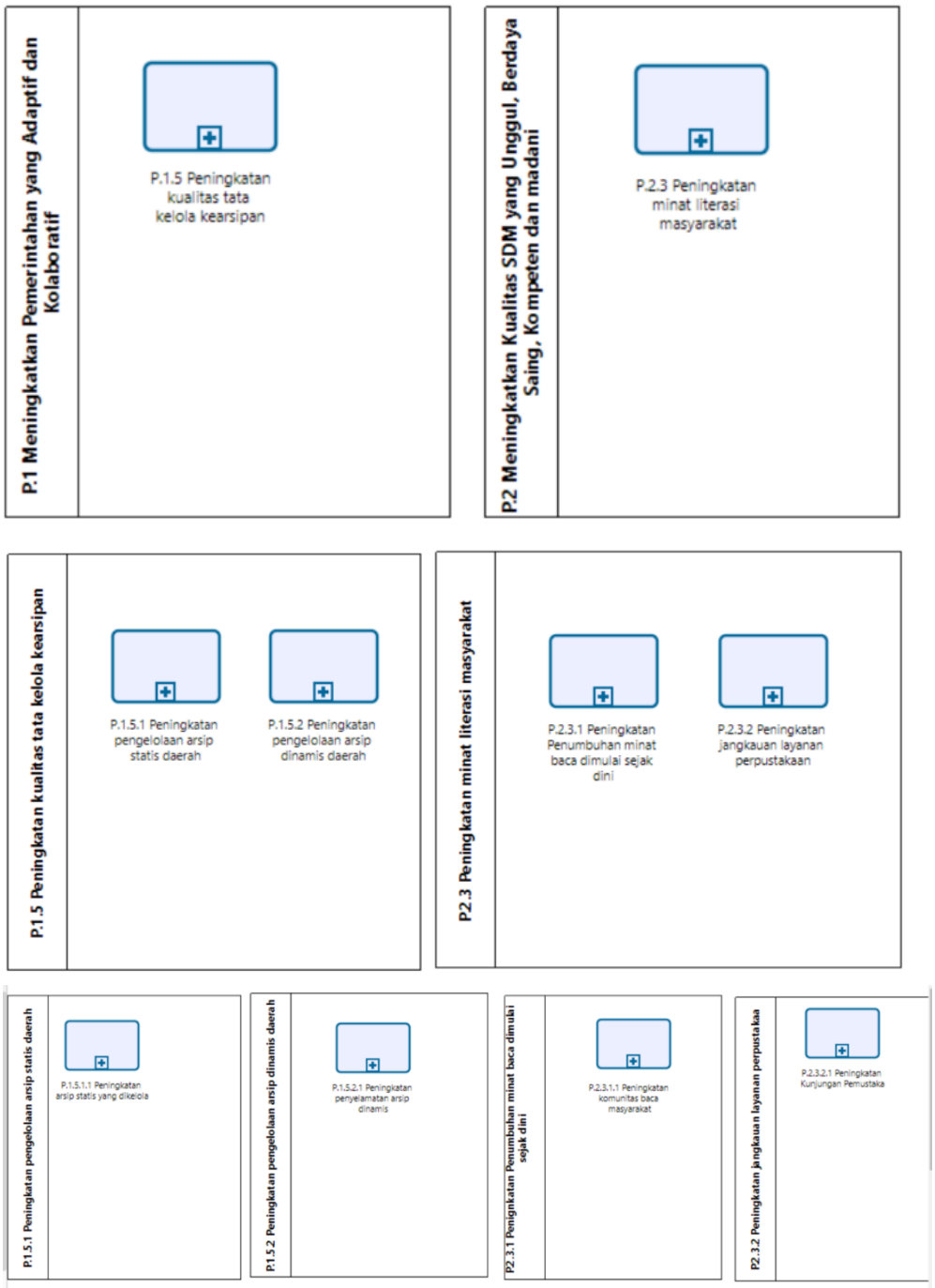

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan perpustakaan dan kearsipan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor

14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

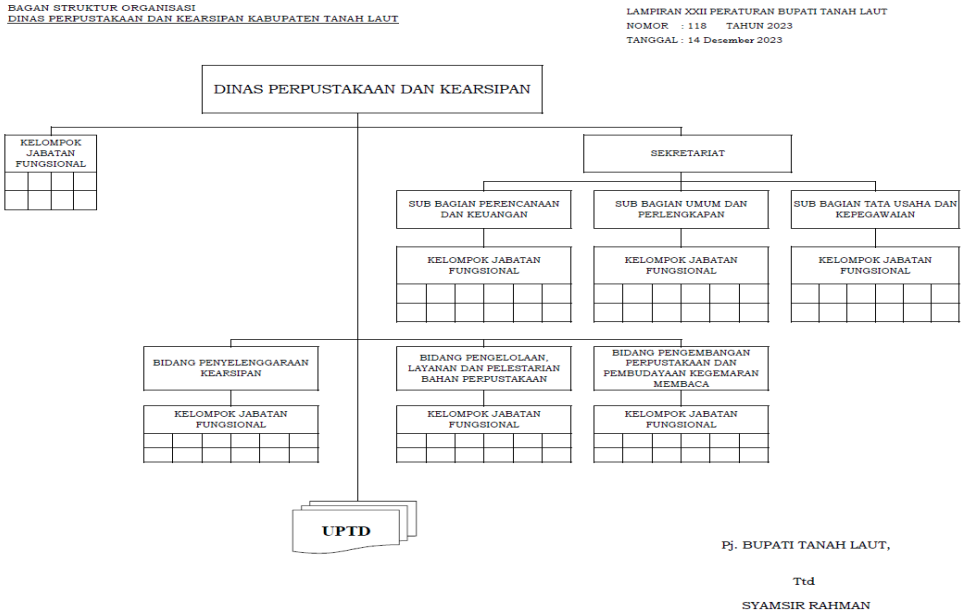

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perpustakaan, bidang kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(I) Untuk melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:

i. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

ii. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
iii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
iv. pelaksanaan administrasi dinas
v. pembinaan UPTD dinas; dan
vi. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
1) menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran;
3) administrasi umum dan kepegawaian; dan
4) ketatausahaan.

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:
1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
2) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang lain di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan

dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

9) pengkoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan

10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan

11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan dinas

4. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan.

5. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha dan kepegawaian.

6. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan

a. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan kearsipan

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Kearsipan fungsi:

1. penyusunan Renja Bidang penyelenggaraan kearsipan;

2. perumusan kebijakan Bidang penyelenggaraan kearsipan;
3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan kearsipan;
4. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan layanan informasi kearsipan;
5. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip;
6. pelaksanaan kebijakan dokumentasi;
7. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kearsipan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

a. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi:

1) pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi Daerah/*local content*, pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk

subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data

2) penyusunan Renja bidang pengelolaan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan
3) perumusan kebijakan bidang pengelolaan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan
4) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengelolaan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
5) pelaksanaan layanan, otomatisasi, dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi seperti perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya, promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan *website* dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
6) pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master digital;
7) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
8) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria, pendataan perpustakaan, dan

pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

9) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;

10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

a. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai fungsi: penyusunan Renja bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;

1) perumusan kebijakan bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;

2) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca

3) pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca;
4) pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DISPUSIP	Permasalahan DISPUSIP	Isu KLHS yang Relevan dengan DISPUSIP	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DISPUSIP			Isu Strategis DISPUSIP
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Melimpahnya sumber daya alam di sektor primer mencerminkan potensi sumber daya manusia yang terbiasa beradaptasi	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Hijau	Perkembangan teknologi, yang diproyeksikan akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini.	Kurangnya Literasi di Berbagai Skill	1. Kemiskinan dan SDM unggul menjadi kunci transformasi sosial dan ekonomi. 2. Minimnya sarana dan prasarana layanan dasar	Kondisi Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal dalam meningkatkan Minat Baca dan Literasi di Era Digital

dengan kondisi alam. Potensi ini dapat dikembangkan dengan menciptakan tenaga kerja baru yang tidak hanya mendukung industri, tetapi juga mengedepankan kearifan lokal yang ramah lingkungan						
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di daerah terpencil. 2. Potensi peningkatan digitalisasi layanan publik, guna mempercepat akses dan	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)	-	Tata kelola Pemerintahan yang belum efektif	Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	Transformasi kearsipan digital yang mampu mendorong pemerintahan yang efektif, memajukan ilmu pengetahuan, dan memperkuat budaya bangsa.

pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.						

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 46 orang yang terdiri dari 25 PNS, 4 PPPK penuh waktu dan 13 PPPK paruh waktu , Tenaga Outsorching 1 orang dan Tenaga Ahli 3 Orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	**Total**	Pendidikan							**Total**
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
6	17	2	-	17	**42**	6	24	2	-	10	-	-	**42**

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai peta jabatan adalah 75 (tujuh puluh lima) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 42 (empat puluh dua) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 8 Pejabat struktural, 7 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 10 orang fungsional umum (JFU) dan 17 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 42 pegawai negeri sipil ditambah dengan 3 orang tenaga ahli, dan 1 tenaga outsourching.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 480 unit peralatan , 2 unit gedung kantor, 1 mushalla dan 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 6 unit kendaraan roda empat, kendaraan roda dua 5 unit.

Tabel 1.3

Program, kegiatan dan Pagu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.976.448.283,69**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.252.282,10
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.379.279.885,00
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.648.00,00
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.593.396,59
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797.336.220,00
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.338.500,00
II	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**2.743.181.812,56**
	1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.448.937.609,93
	2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	294.244.202,63
III	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**70.877.578,00**
	1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	70.877.578,00
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**117.576.959,68**
	1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	21.467.561,25
	2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	49.606.513,00
	3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	46.502.885,35
V	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**60.243.985,00**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
	1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	13.736.496,00
	2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	7.215.000,00
	3 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	39.292.399,00

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/223 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, dengan nilai 81,10 predikat A kategori Memuaskan, bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

NO	SARAN / REKOMENDASI	RENCANA AKSI	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Status/progress
1	Menyusun Langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan	Pelaksanaan pemantauan kinerja triwulan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun	2 kali	TW 3 2025-TW 4 2025	Sekretaris	Telah dilaksanakan

NO	SARAN / REKOMENDASI	RENCANA AKSI	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Status/progress
	memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan					
2	Melakukan pemantaun SKP Bulanan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun factor penunjangnya	Melakukan Penialain SKP bulanan bawahan oleh pimpinan dengan memberikan Feedback	12 Kali	Januari-Desember	Eselon II, III dan IV	Telah dilaksanakan
3	Pengukuran Kinerja agar di pantau realisasinya setiap triwulan dan di perhitungkan sesuai dengan data dukung yang memadai agar dapat dievaluasi	Monev realisasi pengukuran kinerja eselon II dan III pertriwulan	2 kali	TW 3 2025-TW 4 2025	Sekretaris	Telah dilaksanakan

NO	SARAN / REKOMENDASI	RENCANA AKSI	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Status/progress
	secara berkala khususnya untuk Eselon II dan Eselon III.					
4	Melakukan Perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah.	- Membuat PK perubahan sesuai dengan kegiatan dan sub kegiatan yang di ampu oleh Kepala Bidang Masing-masing - Mengumpulkan bahan dalam pembuatan renstra 2025-2029	1 Kali	TW 3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Telah dilaksanakan

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai mitra strategis melalui pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang profesional, akuntabel, dan berbasis standar nasional. Berperan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, peningkatan

kualitas pelayanan publik, serta penguatan literasi dan budaya baca masyarakat.

Sebagai fasilitator, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut di harapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, dan komunitas melalui pembinaan, pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan bermutu dan layanan informasi yang inklusif..

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 1 “Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama” dan Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan termasuk dalam mendukung tujuan kesatu yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatkan Kualitas SDM

yang Unggul dan Berdaya Saing adalah Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Nilai Raport Pendidikan, dan indikator keberhasilan dari Meningkatkan Pemerintahan yang adaftif dan melayani adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat dan Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70.38	70.38	70.43	70.48	70.53	70.58	70.63
			Indeks Reformasi Birokrasi	80,45	81	83	85	87	90	91
	1.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,07	73,17	73,27	73,37	73,47	73,57	73,67
	2.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	81,03	81,50	81,75	82,00	82,50	82,75	83,00

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 000.6.5.1/24-DISPUSIP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Perhitungan hasil Kajian seperti rumus di bawah ini : TGM = (0,3 x TFM + 0,3 x TDM + 0,3 x TJB) + (0,05 x FAI + 0,05 x DAI) TFM =FrekuensiMembaca TDM = Durasi Membaca TJB = Jumlah Buku Dibaca FAI = Frekuensi Akses Internet DAI = Durasi Akses Internet
2	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai pengawasan eksternal x 60 % + Nilai pengawasan internal x 40%

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia.	Peningkatan sarana, prasarana dan aksesibilitas yang sesuai standar dan merata di semua sekolah	Menganggarkan pembimbingan, pendampingan, serta supervisi untuk pendirian perpustakaan di seluruh desa
			Mengadakan sosialisasi pembentukan perpustakaan dengan sasaran peserta Lembaga Vertikal
			Menghibau dan/atau Mengaktifkan Kembali Penerbit DISPUSIP (sudah terdaftar di LIPI/BRIN) untuk mencetakbuku/majalah secara mandiri
			Menganggarkan reward bagi pemustaka yang memberikan hibah buku terbanyak
			Membuat surat Edaran Bupati terkait pembelian

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
			buku perpustakaan disekolah maupun didesa
			memfasilitasi penyusunan analisa jabatan pustakawan
			Berkirim surat secara resmi kepada BKPSDM untuk permohonan formasi pustakawan
			Membuat Surat Edaran Terkait Menunjuk Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Desa Secara Khusus
			Melaksanakan reading aloud/membaca nyaring
			Lomba bertutur/bercerita
			Kontestasi Duta Literasi
			Pembentukan Komunitas Literasi
			Melakukan diskusi buku bulanan
			Membuat lomba meresensi buku yang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
			menjadi koleksi perpustakaan
			Membuat promosi buku yang baru dibeli
			Membuat lomba dalam bentuk kuis yang mengarahkan masyarakat untuk membaca buku
			Melakukan Persuasi terhadap bahan baca
			Pertunjukan literasi
			Melakukan rekomendasi tautan (website) karya tulis ilmiah yang layak dijadikan referensi melalui medsos kantor
2	Meningkatkan Nilai Pengawasan Kearsipan Menuju Nilai A	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Membuat draf Peraturan Bupati tentang SIKN/JIKN
			Melakukan pembinaan lewat bimtek, sosialisasi, fgd, bimbingan konsultasi, supervisi dll kepada semua SKPD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
			Memberikan reward kepada SKPD yang melakukan transaksi pembuatan dan penerimaan serta pemberkasan naskah dinas melalui SRIKANDI
			Menindaklajuti 1 poin Sasaran 5 GNSTA terkait pemusnahan arsip
			Menindaklanjuti sasaran 6 GNSTA : mengidentifikasi pada program kegiatan yang belum teralokasikan
			Memberikan reward kepada Arsiparis dan pengelola arsip yang melakukan pengelolaan arsip sesuai NSPK
			Melakukan pemusnahan arsip secara berkala
			Melakukan pemusnahan arsip hasil penyelamatan arsip penggabungan/ pembubaran perangkat daerah/pemekaran

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
			kecamatan/pemekaran desa/kelurahan
			Melakukan akuisisi, preservasi/pemeliharan dan akses arsip statis
			Memetakan kelengkapan administrasi akreditasi kearsipan
			Mengupayakan pengembangan kompetensi kearsipan Kepala LKD dan Kepala Unit Kearsipan melalui Diklat
			Melakukan pemenuhan ketercukupan tenaga arsiparis dengan koordinasi dengan BKPSDM untuk pengadaan formasi PNS/PPPK Arsiparis
			Melaksanakan pengembangan kompetensi arsiparis dan pengelola arsip melalui

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
			diklat teknis, bimtek, sosialisasi dll
			Melaksanakan pengembangan kompetensi arsiparis melalui diklat fungsional arsiparis dengan koordinasi dengan BKPSDM dan ANRI
			Melakukan pemenuhan arsiparis yang tersertifikasi dengan koordinasi dengan BKPSDM dan ANRI
			Memfasilitasi keikut sertaan ajang arsiparis teladan
			Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	1	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	81,50	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 2 sasaran di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 9.968.328.528,93. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	2.743.181.812,56
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	70.877.578,00
		JUMLAH	2.814.059.390,56
1	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Program Pengelolaan Arsip	117.576.959,68
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	60.243.985,00
		JUMLAH	177.820.944,68

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029, terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata capaian IKU sebesar **88,84%** dengan kategori **Tinggi**.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 000.6.5.1/24-DISPUSIP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025- 2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan							
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,17	56,29	76,93%	Tinggi
2	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	1	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	81,50	82,12	100,76%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025						**88,84%**	**Tinggi**

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-

masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut

Tabel 3.5

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN		RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya* *jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah*		**Realisasi** **---------- X 100%** **Target**
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.		

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*	**Target** / **----------** **X** / **100%** / **Realisasi**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	**Target** / **----------** **X** / **100%** / **Realisasi**
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan**.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah.

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	73,17
		Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	81,50

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1) Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat
2) Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat

Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	72,54	53,53	73,03	73,17	56,29	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									**76,93%**

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	73,17	56,29	Tinggi	73,57	76,51

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Balangan	Banjarbaru	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	58,16	57,29	54,92	57,1	-

a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat / Tingkat Kegemaran Membaca

Pada Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggunakan Tingkat Kegemaran Membaca sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, terdapat perubahan kebijakan pengukuran yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025, yang menggunakan metode dan instrumen terbaru.

Sebelumnya, pengukuran masih menggunakan istilah Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dengan rumus:

TGM = (0,3 × TFM + 0,3 × TDM + 0,3 × TJB) + (0,05 × FAI + 0,05 × DAI)

Keterangan:

- TFM = Frekuensi Membaca

- TDM = Durasi Membaca
- TJB = Jumlah Buku yang Dibaca
- FAI = Frekuensi Akses Internet
- DAI = Durasi Akses Internet

Perhitungan tersebut lebih menekankan pada seberapa sering dan berapa lama seseorang membaca serta mengakses informasi.

Sejak diberlakukannya peraturan terbaru, istilah TGM berubah menjadi Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) dengan metode pengukuran yang berbeda. Pengukuran TKM kini didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu:

- Dimensi pra membaca sebesar 15 persen,
- Dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan
- Dimensi pasca membaca sebesar 35 persen.

Pendekatan ini tidak hanya melihat frekuensi dan durasi membaca, tetapi juga memperhatikan kesiapan sebelum membaca, proses saat membaca, serta dampak atau tindak lanjut setelah membaca.

Dengan adanya perubahan metode dan instrumen tersebut, hasil pengukuran tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, karena target lama masih menggunakan metode perhitungan TGM. Oleh karena itu, nilai yang diperoleh saat ini bukan menunjukkan adanya penurunan atau kenaikan, melainkan merupakan hasil pengukuran baru dengan pendekatan yang lebih menyeluruh sehingga di perlukan penyesuaian target terbaru untuk IKU Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) pada Renstra Tahun 2025-2029.

Berikut ini adalah tabel penyesuaian Target terbaru IKU Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) pada Renstra Tahun 2025-2029 :

Kategori Indikator 2024	Nilai Perolehan 2024	Kategori Indikator 2025	Nilai Perolehan 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	**73.07**	**Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)**	**56.29**	73.27	73.37	73.47	73.57	73.67	Renstra 2025-2029

Kategori Indikator 2024	Nilai Perolehan 2024	Kategori Indikator 2025	Nilai Perolehan 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frekuensi Membaca	81.55	Pra Membaca 15 %	50.26						
Durasi Membaca	61.96	Saat Membaca 50%	55.2						
Jumlah Buku/ Bahan Bacaan	75.32	Pasca membaca 35%	60.28						
Frekuensi Akses Internet	82.13	-	-						
Durasi Akses Internet	66.18	-	-						

Penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2026–2039 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya (2025) sebagai baseline kinerja, serta proyeksi peningkatan yang realistis dan terukur. Penetapan target juga memperhatikan dukungan alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan budaya baca, termasuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan, penyediaan koleksi, serta promosi literasi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan pada perpustakaan umum, sekolah, dan khusus, serta penguatan koleksi bahan bacaan menjadi faktor pendukung dalam mendorong peningkatan capaian TKM secara bertahap dan berkelanjutan.

Grafik 3.1.1

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) 2022 – 2024

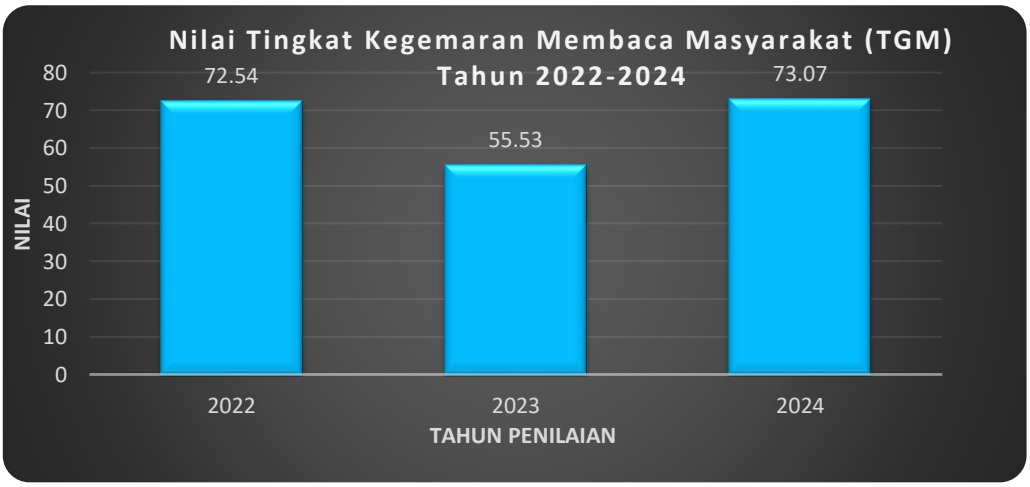

Grafik 3.1.2

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan dari 73,03 menjadi 56,29. Demikian pula apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi Tahun 2025 masih berada di bawah capaian tersebut. Namun pada Tahun 2025 terjadi perubahan kebijakan pengukuran yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan tersebut mencakup penggunaan instrumen dan metodologi terbaru, sekaligus penyesuaian istilah dari Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) menjadi Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Dengan adanya perubahan metode pengukuran tersebut, hasil Tahun 2025 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan metode lama. Oleh karena itu, penurunan angka realisasi pada Tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh perubahan instrumen dan pendekatan pengukuran.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Berdasarkan tabel perbandingan, target Tahun 2025 untuk indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat ditetapkan sebesar 73,17, dengan realisasi sebesar 56,29, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 berada pada kategori Tinggi. Adapun target akhir Renstra ditetapkan sebesar 73,57. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 56,29, maka tingkat capaian terhadap target akhir Renstra adalah sebesar 76,51%. Hal ini menunjukkan bahwa hingga Tahun 2025, capaian indikator masih berada di bawah target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan.

Namun target akhir Renstra disusun berdasarkan metode penghitungan lama (Nilai Tingkat Kegemaran Membaca/TGM), sedangkan pada Tahun 2025 telah diberlakukan metodologi baru sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 dengan pendekatan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Perubahan instrumen dan metodologi pengukuran tersebut berdampak pada hasil capaian yang tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan target Renstra. Oleh karena itu, selisih antara realisasi Tahun 2025 dan target akhir Renstra lebih dipengaruhi oleh perubahan sistem pengukuran, bukan karena penurunan kinerja substantif.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Realisasi Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebesar 56,29. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, capaian tersebut masih berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu (58,16) dan Kabupaten Balangan (57,29), namun lebih tinggi dibandingkan Kota Banjarbaru (54,92). Dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi sebesar 57,10, nilai Kabupaten Tanah Laut relatif mendekati rata-rata provinsi dengan selisih yang tidak signifikan. Data capaian tingkat nasional belum tersedia, sehingga perbandingan pada tingkat nasional belum dapat dilakukan. Pengukuran pada Tahun 2025 telah menggunakan metodologi terbaru sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025.

Dengan demikian, perbandingan capaian antar daerah pada tahun berjalan telah menggunakan instrumen yang sama, sehingga hasilnya dapat

diperbandingkan secara proporsional. Secara umum, posisi Kabupaten Tanah Laut berada pada kategori menengah dan masih memiliki ruang peningkatan untuk mencapai atau melampaui rata-rata provinsi pada periode berikutnya.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat", Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan Peningkatan komunitas baca masyarakat, dan Peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan.

a. Peningkatan komunitas baca masyarakat

Peningkatan Komunitas Baca Tanah Laut telah dilaksanakan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Komunitas baca dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan literasi, seperti diskusi buku, kegiatan membaca bersama, bedah buku, serta berbagai aktivitas literasi lainnya yang bersifat edukatif dan inklusif. Keberadaan komunitas baca diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan perpustakaan sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mendukung gerakan literasi daerah.Adapun beberapa kegiatan yang di laksanakan untuk meningkatkan komunitas baca di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi Budaya baca dan Diskusi Buku

Pada tanggal 24 September 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca melaksanakan kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat dengan tema "Gemar Membaca Hebat" di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang. Kegiatan ini dihadiri oleh pendidik PAUD, TK, SD, serta masyarakat umum, dengan narasumber Hj. Maziniah Elmi, S.Ag. Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2025, dilaksanakan kegiatan Diskusi Buku dengan judul "Bersikap Tenang dalam Kondisi Apa Pun" yang bertempat di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Hj. Maziniah Elmi, S.Ag. dan diikuti oleh peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

Pada tanggal 30 September 2025, kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi kembali dilaksanakan dengan tema “Gemar Membaca Hebat” di Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau, yang dihadiri oleh perangkat desa, guru SD, dan masyarakat umum, dengan narasumber Siti Rukayah, M.Pd. Kegiatan ini dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan Diskusi Buku berjudul “Terima Kasih Sahabat” yang menghadirkan narasumber Siti Rukayah, M.Pd. Selain itu, kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi serta diskusi buku juga dilaksanakan di Kantor Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong dan Kantor Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati dengan peserta yang terdiri atas masyarakat, perangkat desa, guru TK, pelajar, dan mahasiswa. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 1 Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar dan UPTD SMP Negeri 1 Takisung Kecamatan Takisung dengan sasaran peserta siswa kelas VII, VIII, dan IX serta guru mata pelajaran. Narasumber dan moderator pada kegiatan tersebut berasal dari Ikatan Penulis Tanah Laut (IPTL).

Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Diskusi Buku di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Tanah Laut

2. Promosi budaya gemar membaca dan pembentukan Ikatan Penulis Tanah Laut

Pada Mei 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca melaksanakan pertemuan dengan Komunitas Gemar Membaca dalam rangka mempersiapkan strategi promosi budaya gemar membaca di masyarakat. Selanjutnya, pada Juni 2025, bertempat di Ruang Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan pertemuan dengan Komunitas Penulis Tanah Laut untuk membahas pembentukan Ikatan Penulis Tanah Laut (IPTL) periode 2025–2026. Sebagai upaya memperluas jangkauan promosi literasi, kegiatan pembudayaan kegemaran membaca juga dilakukan melalui media elektronik dengan bekerja sama dengan Radio Tuntung Pandang FM melalui siaran promosi gemar membaca.

Siaran Promosi Gemar Membaca di Radio Tuntung Pandang FM

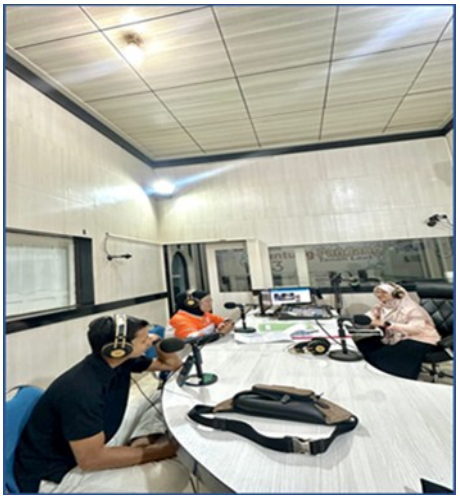

Pertemuan Komunitas Baca Binaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya, pada tanggal 20 November 2025, dilaksanakan pelantikan Pengurus Ikatan Penulis Tanah Laut (IPTL) periode 2025–2026 sebanyak 20 orang yang bertempat di Aula Rakat Manuntung Hutan Jati. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten III Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Rudi Ismanto, yang mewakili Bupati Tanah Laut H. Rahmat Triyanto, serta dimeriahkan dengan penampilan Sanggar Budaya Lintang Kencana dan binaan Rumah Belajar Modern (RBM). Kegiatan dilanjutkan dengan rapat komunitas IPTL untuk membahas agenda kerja periode 2025–2026.

Pelantikan Ikatan Penulis Tanah Laut

3. Sosialisasi dan Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial

Pada bulan September 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dalam rangka memperkenalkan kelas Inklusi Sosial atau Rumah Belajar Modern (RBM) kepada masyarakat dan satuan pendidikan. Kegiatan sosialisasi diawali pada tanggal 11 September 2025 di UPTD SMP Negeri 1 Takisung, kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 September 2025 di UPTD SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Tambang Ulang. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 di UPTD SDN Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur dan UPTD SMP Negeri 1 Kurau Kecamatan Kurau, diteruskan pada tanggal 19 September 2025 di UPTD SMP Negeri 2 Bajuin, pada tanggal 24 September 2025 di SMA Negeri 1 Batu Ampar, pada tanggal 1 Oktober di dan SMPN 1 Jorong dan SMPN 1 Kintap, pada tanggal 2 oktober di SMPN 3 dan MTSN 5 Tanah Laut Kecamatan Panyipatan.

Kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial di beberapa Sekolah yang ada di kabupaten Tanah Laut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi tersebut, Rumah Belajar Modern (RBM) dilaksanakan pada periode 18 Oktober hingga 14 Desember 2025 dengan menyediakan 12 kelas pilihan, yaitu kelas barista, bakery dan pastry, bahasa Inggris, film, teater, musik piano dasar, musik gitar, musik drum, sastra, bahasa Arab, sejarah lokal, dan melukis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, serta kemandirian masyarakat melalui penguatan literasi berbasis inklusi social

Kelas Drum

Kelas Gitar

Kelas Melukis

Kelas Teater

Kelas Sejarah

Kelas Bahasa Inggris

Kelas Sastra

Kelas Bahasa Arab

Kelas Piano

Kelas Film

Kelas Barista

Kelas Bakery

4. Pelaksanaan Lomba Literasi dan Pemberian Penghargaan Kepada Pemustaka

Pada Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan berbagai lomba literasi sebagai upaya meningkatkan minat baca, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya literasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Lomba Cipta Jingle Perpustakaan, Lomba Resensi Buku, dan Lomba Cipta Cerpen yang diikuti oleh berbagai unsur masyarakat.

Selain pelaksanaan lomba literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga memberikan penghargaan kepada pemustaka dan penulis sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan partisipasi aktif dalam pengembangan literasi daerah. Pemberian penghargaan tersebut diserahkan pada acara Tanah Laut Expo dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-60 yang dilaksanakan di Pertasi Kencana Pelaihari.

Melalui pelaksanaan lomba literasi dan pemberian penghargaan ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk gemar membaca dan menulis serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi masyarakat.

Penyerahan Pemenang Lomba Resensi Buku

Penyerahan Pemenang Lomba Cipta Jingle Perpustakaan

Penyerahan Pemenang Lomba Menulis Cerpen

Penyerahan Plakat Penghargaan Kepada Pemustaka

Penyerahaan Plakat Penghargaan kepada Penulis

b. Peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan

Kunjungan pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan tercatat sebanyak 9.013 pemustaka, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 11.631 pemustaka. Dengan demikian, terjadi peningkatan kunjungan sebesar 2.618 pemustaka.

Peningkatan kunjungan ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Hal tersebut didukung oleh optimalisasi layanan perpustakaan, pengembangan koleksi yang sesuai kebutuhan pemustaka, serta pelaksanaan kegiatan literasi dan budaya gemar membaca.

Selain itu, kerja sama dengan sekolah, komunitas literasi, serta pemerintah desa/kelurahan, disertai perbaikan sarana prasarana dan promosi layanan perpustakaan, turut mendorong meningkatnya jumlah

kunjungan. Dalam rangka meningkatkan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan berbagai kegiatan strategis diantaranya yaitu :

1. **Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa serta Lembaga**

   Pelaksanaan pembinaan perpustakaan pada Sekolah dan Desa serta Lembaga telah dilaksanakan secara terencana melalui kegiatan pendampingan pengelolaan perpustakaan, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, serta fasilitasi pemenuhan standar layanan perpustakaan. Pembinaan Perpustakaan sekolah di laksanakan di 11 kecamatan yang ada kabupaten Tanah laut yang dimulai pada tanggal 01 s.d 30 september 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan agar dapat berfungsi sebagai pusat belajar dan literasi bagi peserta didik dan masyarakat desa dari segi pengelolaan maupun administrasi.

Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa serta Lembaga di Kabupaten Tanah Laut

SMPS SIRAJUL HUDA, Pelaihari

UPTD SDN 1 ALUR, Kecamatan Jorong

UPTD SMPN 6 KINTAP, Kecamatan Kintap

UPTD SDN 2 TIRTA JAYA, Kec.Bajuin

UPTD SDN 1 PANYIPATAN, Kecamatan Panyipatan

UPTD SDN MALUKA BAULIN, Kecamatan Kurau

UPTD SDN RANGGANG DALAM, Kecamatan Takisung

UPTD SDN 1 GUNUNG MELATI, Kec. Batu Ampar

UPTD SMPN 1 TAMBANG ULANG, Kecamatan Tambang Ulang

UPTD SMPN 6 BATI-BATI, kecamatan Bati-Bati

KUA Pelaihari

Bank KALSEL Pelaihari

UPTD SDN HANDIL BABIRIK, Kecamatan Bumi Makmur

Perpustakaan Desa Anggrek Kecamatan Bajuin

BSI KCP Pelaihari

Kelurahan Angsau

Perpustakaan Desa Padang, Kecamatan Bati-bati

Perpustakaan Berkah Ilmu Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang

Kelurahan Pabahanan

Puskesmas Angsau

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan, minimnya tenaga pengelola yang memiliki kompetensi kepustakawanan, serta belum optimalnya dukungan anggaran di tingkat satuan pendidikan dan desa. Selain itu, tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh siswa dan masyarakat desa belum merata. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan pembinaan secara berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah desa, serta pengembangan inovasi layanan dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong peningkatan kualitas dan pemanfaatan perpustakaan sekolah dan desa secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan Serta Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan dan tenaga perpustakaan, baik pada perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa, telah dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan pengelolaan perpustakaan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga perpustakaan dalam pengelolaan koleksi, pelayanan pemustaka, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan. Capaian kinerja menunjukkan adanya peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dalam mendukung penyelenggaraan layanan perpustakaan yang lebih tertib, terstandar, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Pada Tanggal 21 – 22 Mei 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Bidang Pengelolaan layanan dan Pelestraian Bahan Perpustakaan melaksanakan Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain keterbatasan jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi kepustakawanan, belum meratanya akses pelatihan bagi pengelola perpustakaan sekolah dan desa, serta perlunya penyesuaian kompetensi dengan standar nasional perpustakaan. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terencana melalui penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemanfaatan pelatihan

berbasis daring dan luring, serta mendorong sertifikasi kompetensi tenaga perpustakaan guna meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekolah dan desa secara berkelanjutan.

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Pada Tanggal 21 – 22 Mei 2025 (Angkatan 1 Dan Angkatan 2) Bertempat Di Algoritma

Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Tingkat SD Sederajat Dan SMP Sederajat Pada Tanggal 18 Juni 2025 Bertempat Di Algoritma

3. Peningkatan Ketercukupan Anggota Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan ketercukupan dan jumlah anggota perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat promotif dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan perpustakaan keliling yang menjangkau sekolah, desa, dan ruang publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan perpustakaan serta mendaftar sebagai anggota.

Selain itu, kegiatan story telling juga dilaksanakan sebagai sarana menarik minat baca anak-anak dan pelajar sekaligus memperkenalkan fungsi dan manfaat perpustakaan sejak dini. Untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan turut

melaksanakan beberapa siaran literasi melalui Radio Tuntung Pandang FM. Kegiatan siaran radio ini dimanfaatkan sebagai media sosialisasi layanan perpustakaan dan ajakan menjadi anggota perpustakaan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap layanan perpustakaan semakin meningkat, sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah anggota perpustakaan.

Layanan Perpustakaan Keliling di Sekolah Dasar di Tanah Laut

Layanan Story Telling

4. Peningkatan Koleksi Perpustakaan

Peningkatan koleksi perpustakaan daerah, sekolah, dan desa telah dilaksanakan melalui berbagai strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis perpustakaan.

Peningkatan koleksi perpustakaan sekolah dilaksanakan melalui kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (Politeknik) dengan perpustakaan daerah. Melalui kerja sama tersebut, perpustakaan sekolah memperoleh dukungan koleksi bacaan, pendampingan pengelolaan koleksi, serta akses pemanfaatan sumber informasi yang dimiliki perpustakaan daerah. Serta di terima nya beberapa hibah buku dari masyarakat sepanjang tahun 2025.

MoU dengan Politeknik Tanah Laut

Penerimaan Hibah Buku dari Masyarakat

Hibah Buku dari Dewan Kesenian Tanah Laut

Hibah Buku dari Dispersip Provinsi Kalsel

5. Peningakatan sarana prasarana perpustakaan

Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi penyediaan serta pemeliharaan fasilitas perpustakaan, antara lain perbaikan ruang layanan, penambahan perabot, dan penyediaan perlengkapan pendukung layanan perpustakaan.

Pada bulan Oktober 2025, telah dilakukan penambahan perabot dan perlengkapan pelayanan perpustakaan berupa 1 set terowongan mainan indoor, 2 set mainan jungkat-jungkit, serta 1 set mainan ayunan indoor yang ditujukan untuk menunjang layanan ramah anak. Pada periode yang sama, Perpustakaan Daerah juga menerima hibah berupa 12 unit rak buku dari Gramedia Duta Mall Banjarmasin serta Pembelian 100 eksemplar buku sebagai tambahan koleksi perpustakaan.

Peningkatan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perpustakaan yang nyaman, representatif, dan ramah bagi seluruh pemustaka.

Penambahan Sarpras Permainan Anak Outdor

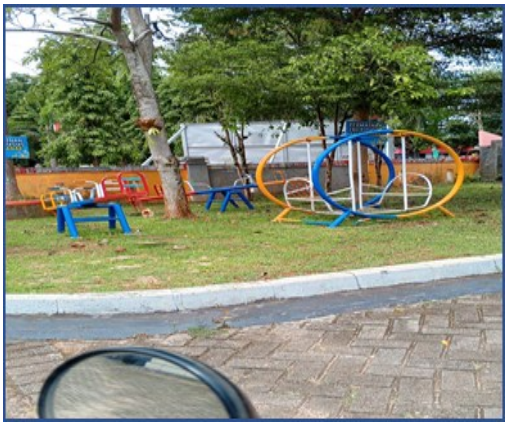

Penambahan Sarpras Permainan Anak Indoor

Penambahan Rak Buku

Pembelian Koleksi Bahan Pustaka

Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka

Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah memberikan dampak positif terhadap kelancaran penyelenggaraan layanan perpustakaan serta meningkatkan kenyamanan dan minat kunjung masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih diperlukan penyesuaian dan pemeliharaan secara berkelanjutan agar sarana dan prasarana yang tersedia tetap sesuai dengan standar layanan perpustakaan dan perkembangan kebutuhan pemustaka. Ke depan, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah perlu terus dioptimalkan melalui perencanaan yang terarah, pemeliharaan yang berkesinambungan, serta pemanfaatan fasilitas secara maksimal guna mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. **Komitmen dan dukungan pimpinan daerah serta perangkat daerah terkait**
   Dukungan kebijakan dan program dari pemerintah daerah mendorong terlaksananya berbagai kegiatan literasi secara berkelanjutan.
2. **Keberadaan komunitas baca dan pegiat literasi yang aktif**
   Keterlibatan komunitas baca, penulis lokal, serta relawan literasi berperan besar dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi, diskusi buku, dan promosi gemar membaca.
3. **Variasi kegiatan literasi yang inovatif dan inklusif**
   Pelaksanaan lomba literasi, *story telling*, diskusi buku, serta literasi berbasis inklusi sosial mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
4. **Peningkatan kualitas layanan perpustakaan**
   Pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan standar nasional perpustakaan meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
5. **Dukungan sarana, prasarana, dan koleksi perpustakaan**
   Penambahan koleksi, perabot, dan fasilitas pendukung menciptakan suasana perpustakaan yang nyaman dan ramah bagi pemustaka.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. **Minat baca masyarakat yang masih belum merata**
   Sebagian masyarakat belum menjadikan aktivitas membaca sebagai kebutuhan, sehingga partisipasi dalam kegiatan literasi masih terbatas di beberapa wilayah.
2. **Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM perpustakaan**
   Pengelola perpustakaan sekolah dan desa belum seluruhnya memiliki latar belakang dan keterampilan kepustakawanan yang memadai.
3. **Belum optimalnya koordinasi lintas sektor**
   Sinergi antara perpustakaan, satuan pendidikan, desa, dan komunitas literasi di beberapa kegiatan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih terintegrasi.

4. **Akses dan kondisi geografis wilayah yang beragam**
   Jarak tempuh yang jauh dan kondisi wilayah tertentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan layanan perpustakaan keliling secara rutin.
5. **Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat**
   Masyarakat, khususnya generasi muda, lebih tertarik pada media digital dan hiburan instan sehingga minat terhadap bahan bacaan masih relatif rendah.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. **Penguatan kampanye gemar membaca secara berkelanjutan**
   Melalui kegiatan sosialisasi, lomba literasi, dan promosi budaya baca yang menyasar berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat.
2. **Peningkatan kapasitas dan pendampingan SDM perpustakaan**
   Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan berkelanjutan bagi pengelola perpustakaan sekolah, desa, dan lembaga.
3. **Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor**
   Meningkatkan kerja sama dengan perangkat daerah, sekolah, pemerintah desa, komunitas literasi, dan pegiat budaya baca untuk mendukung pelaksanaan program.
4. **Pengembangan layanan perpustakaan berbasis jemput bola**
   Memaksimalkan layanan perpustakaan keliling dan kegiatan literasi di lokasi strategis agar menjangkau wilayah yang sulit diakses.
5. **Pemanfaatan media digital dan media massa sebagai sarana promosi literasi**
   Mengintegrasikan konten literasi melalui media sosial, siaran radio, dan platform digital untuk menyesuaikan dengan pola konsumsi informasi masyarakat.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 47 ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 2.814.059.390,56 dan terealisasi Rp. 416.080.434,00 atau sebesar 14,78%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	2.743.181.812,56	416.080.434,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	70.877.578,00	0,00
JUMLAH			2.814.059.390,56	416.080.434,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(2.814.059.390,56 \times 76,93\%) - 416.080.434,00}{(2.814.059.390,56 \times 76,93\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 80,78 %

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
76,93%	14,78%	80,78%

Pengukuran efisiensi belum dapat dilakukan karena nilai Tingkat Kegemaran Membaca belum dirilis oleh Perpustakaan Nasional, sehingga hasil kinerja belum dapat dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah

Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	61.29	76.59	81,03	81,50	82,12	100,76%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									100,76%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	81,50	82,12	100,76%	82,75	99,23%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tanah bumbu	Balangan	Banjarbaru	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	70,71	65,87	72,56	AA (Sangat Memuaskan)	-

a. Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah

Nilai Pengawasan Kearsipan adalah suatu indikator kuantitatif yang mengukur efektivitas dan kepatuhan instansi atau lembaga terhadap standar dan peraturan kearsipan yang berlaku. Nilai ini berfungsi sebagai alat untuk menilai seberapa baik sebuah organisasi dalam mengelola arsipnya, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Nilai Pengawasan Kearsipan diukur melalui beberapa dimensi utama yang mencakup seluruh siklus hidup arsip. Setiap komponen memiliki bobotnya masing-masing yang mencerminkan tingkat kepentingannya.Komponen-komponen tersebut yang terdiri dari :

- Aspek Kebijakan Kearsipan: Ketersediaan dan implementasi kebijakan, peraturan, dan pedoman kearsipan yang jelas di dalam organisasi.
- Aspek Sumber Daya Kearsipan: Ketersediaan sumber daya manusia (arsiparis), anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan kearsipan.
- Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis: Praktik pengelolaan arsip yang masih aktif dan digunakan sehari-hari.
- Aspek Pengelolaan Arsip Statis: Penanganan arsip yang memiliki nilai guna abadi dan harus disimpan permanen untuk tujuan sejarah dan penelitian.
- Aspek Pengawasan dan Pembinaan Kearsipan: Kegiatan pengawasan internal dan eksternal, serta upaya pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kearsipan.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Nilai Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut memperoleh realisasi sebesar 82,12, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 81,50. Dengan capaian tersebut, tingkat kinerja mencapai 100,76%, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar kearsipan nasional.

Nilai Pengawasan Kearsipan tersebut merupakan akumulasi dari dua unsur penilaian, yaitu Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) dan Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI), dengan bobot penilaian masing-masing sebagai berikut:

a. Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) memperoleh nilai 85,29 dengan bobot 60%, sehingga memberikan kontribusi sebesar 51,17% terhadap Nilai Pengawasan Kearsipan.
b. Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) memperoleh nilai 77,37 dengan bobot 40%, sehingga memberikan kontribusi sebesar 30,95% terhadap Nilai Pengawasan Kearsipan.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi sebagian besar unsur penilaian pengawasan kearsipan, baik dari aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, maupun pengawasan internal, serta mendukung terwujudnya tata kelola kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel.

Grafik 3.1.2

Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah 2021 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran **Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah** dengan indikator **Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah** pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Realisasi kinerja tercatat sebesar 82,12, melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,50, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,76**%**.Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kinerja pengawasan kearsipan daerah pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 81,03. Secara lebih luas, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2023, kinerja pengawasan kearsipan menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan kearsipan di lingkungan perangkat daerah.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut telah berjalan efektif serta selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah sampai dengan tahun 2025 menunjukkan capaian yang mendekati target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut**.** Pada tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 82,12**,** sementara target akhir Renstra ditetapkan sebesar 82,75, sehingga tingkat capaian terhadap target jangka menengah mencapai 99,23%**.** Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan kearsipan telah berjalan selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis OPD, serta mengindikasikan bahwa target jangka menengah berada dalam

jangkauan pencapaian dan mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Berdasarkan perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah antar kabupaten/kota, terlihat adanya variasi capaian kinerja di masing-masing daerah. Kota Banjarbaru memperoleh nilai 72,56, diikuti oleh Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 70,71, dan Kabupaten Balangan dengan nilai 65,87. Sementara itu, Kabupaten Tanah Laut mencatat nilai pengawasan kearsipan yang lebih tinggi, yaitu 82,12, yang menunjukkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota pembanding.

Pada tingkat provinsi, hasil evaluasi pengawasan kearsipan menunjukkan capaian dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), yang mencerminkan penyelenggaraan kearsipan yang sangat baik dan sesuai dengan standar nasional. Perbedaan capaian antar daerah ini dipengaruhi oleh tingkat pembinaan kearsipan, kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan sistem kearsipan di lingkungan perangkat daerah. Hasil perbandingan ini menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan daerah secara berkelanjutan.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan “Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah”, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan Peningkatan keamanan arsip daerah, Peningkatan kepatuhan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah, dan Peningkatan kapasitas SDM kearsipan.

a. Peningkatan keamanan arsip daerah

1. Penyelamatan arsip dinamis

Penyelamatan arsip dinamis dilaksanakan melalui pendataan dan penyusunan daftar arsip dinamis, penilaian kondisi fisik dan tingkat risiko

arsip, serta penataan dan penyimpanan arsip sesuai standar kearsipan, termasuk penggunaan sarana penyimpanan yang memenuhi ketentuan seperti filling cabinet. Kegiatan ini didukung dengan upaya perawatan dan perbaikan ringan terhadap arsip, pengendalian kondisi lingkungan ruang simpan arsip, serta pelaksanaan alih media arsip sebagai bentuk pengamanan informasi. Selain itu, dilakukan pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kepada perangkat daerah guna memastikan pengelolaan dan pengamanan arsip dinamis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.Membuat daftar arsip dinamis dan penyimpanan arsip sesuai standar kearsipan.

Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis

Pada Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut melakukan penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kearsipan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kualitas pengelolaan arsip daerah. Penambahan tersebut meliputi 1 (satu) unit scanner untuk mendukung kegiatan alih media arsip, 1 (satu) unit fire alarm system sebagai upaya pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran, serta 1 (satu) unit thermo hygrometer untuk memantau suhu dan kelembapan ruang penyimpanan arsip agar sesuai dengan standar kearsipan. Penyediaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengamanan arsip serta mendukung terwujudnya pengelolaan kearsipan yang aman dan tertib.

Penambahan 1 Unit Scaner

Penambahan 1 Unit Thermo Hygrometer

Penambahan 1 Unit Fire Alarm system

2. Pengelolaan arsip statis

Pengelolaan arsip statis merupakan salah satu kegiatan utama dalam upaya peningkatan keamanan arsip daerah. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna permanen sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, sumber informasi, serta memori kolektif daerah, sehingga perlu dikelola dan diamankan secara optimal.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan pengelolaan arsip statis melalui kegiatan penerimaan, pengolahan, penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip sesuai dengan ketentuan dan standar kearsipan. Selain itu, dilakukan pengendalian akses arsip,

pengamanan fisik dan informasi arsip, serta upaya pelestarian arsip untuk mencegah kerusakan dan kehilangan.

Melalui pengelolaan arsip statis yang tertib dan sistematis, keamanan arsip daerah dapat terjaga, sehingga arsip tetap utuh, autentik, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertanggungjawaban dan sumber informasi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kegiatan Akuisisi Arsip Statis dari BKPSDM Tanah Laut

Pengelolaan penyimpanan Arsip Statis

3. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, pendataan dan penilaian arsip PD yang digabung atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan &desa/kelurahan, pemusnahan arsip

Perlindungan dan penyelamatan arsip dilaksanakan melalui upaya pengamanan dan penanganan arsip guna mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan arsip, termasuk melalui pendataan dan penilaian arsip pada perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan serta akibat pemekaran

wilayah kecamatan dan desa/kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status arsip, keberlanjutan pengelolaan arsip, serta tertib administrasi kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pada Tahun 2025, tidak terjadi bencana di Kabupaten Tanah Laut yang berdampak terhadap kerusakan arsip daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan difokuskan pada pendataan dan penilaian arsip serta pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna, khususnya arsip dengan masa retensi di bawah 10 tahun. Pemusnahan arsip tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, aman, dan akuntabel. Selain itu, dilaksanakan kegiatan pendataan, penyusunan daftar, dan penilaian arsip serta penyerahan dan/atau pemusnahan arsip pada SKPD yang dibubarkan maupun digabung, guna memastikan kejelasan status arsip dan keberlanjutan pengelolaannya.

Kegiatan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi 10 tahun

Kegiatan pendataan, penyusunan daftar, dan penilaian arsip serta penyerahan dan/atau pemusnahan

Kegiatan pendataan, penyusunan daftar, dan penilaian arsip serta penyerahan dan/atau pemusnahan

arsip pada SKPD yang di gabung

arsip pada SKPD yang di bubarkan

4. Peningkatan digitalisasi arsip daerah

Peningkatan digitalisasi arsip daerah dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat pengamanan arsip, meningkatkan kemudahan akses informasi, serta mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan arsip. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran dan pendampingan penggunaan Aplikasi SRIKANDI, penginputan arsip ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), serta pelaksanaan alih media arsip dari bentuk konvensional ke bentuk digital sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan. Seluruh proses digitalisasi dilengkapi dengan penataan metadata, pengendalian akses, dan penyimpanan arsip digital secara aman guna menjamin keutuhan dan keberlanjutan informasi arsip, sehingga mendukung peningkatan nilai pengawasan kearsipan daerah.

Pendampingan penggunaan Aplikasi SRIKANDI di beberapa SKPD di Kabupaten Tanah Laut

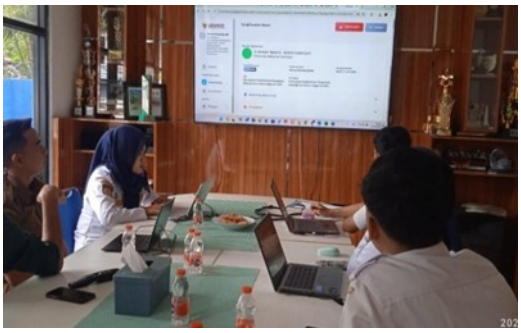

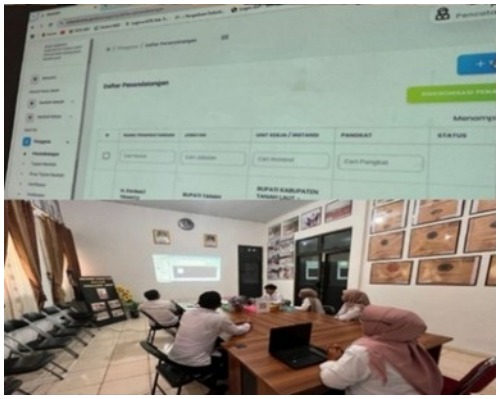

Pengalihmediaan Arsip

Penginputan Arsip yang telah digitalisasi kedalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional)

b. Peningkatan Kepatuhan Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah

1. Pembinaan pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah

Pembinaan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah

Laut memiliki tugas melakukan pembinaan kearsipan terhadap 40 SKPD dan 11 kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut, yang dilaksanakan melalui pendampingan teknis, sosialisasi, serta pemberian arahan terkait pengelolaan arsip dinamis, penataan arsip, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, serta penerapan sistem kearsipan berbasis elektronik. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menerapkan pengelolaan arsip secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Kearsipan

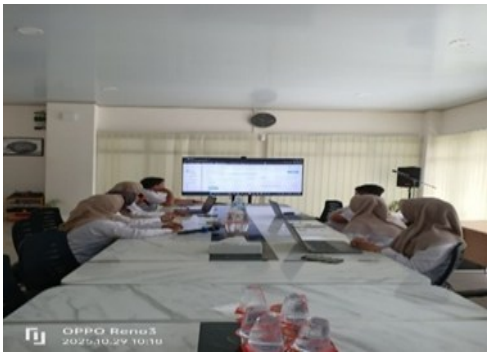

2. Monev tindak lanjut rekomendasi pengawasan kearsipan

Monitoring dan evaluasi (monev) tindak lanjut rekomendasi pengawasan kearsipan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah. Setelah pelaksanaan pembinaan dan pemberian arahan teknis, monev dilakukan untuk memastikan bahwa 40 SKPD dan 11 kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan monev dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap perbaikan pengelolaan kearsipan, meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengelolaan arsip. Melalui monev tindak lanjut ini diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan dan kualitas pengelolaan kearsipan secara berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan nilai pengawasan kearsipan daerah.

Kegiatan pengawasan kearsipan

3. Implementasi standar kepatuhan pengelolaan kearsipan

Implementasi standar kepatuhan pengelolaan kearsipan merupakan hasil dari rangkaian kegiatan pembinaan pengelolaan kearsipan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pengawasan kearsipan pada perangkat daerah. Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan monev terhadap tindak lanjut rekomendasi, perangkat daerah didorong untuk menerapkan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan secara konsisten. Pada Tahun 2025, sebanyak 16 SKPD di Kabupaten Tanah Laut telah mencapai nilai pengawasan kearsipan kategori B, yang mencerminkan telah terpenuhinya standar kepatuhan pengelolaan kearsipan pada aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengelolaan arsip dinamis. Kegiatan ini menjadi indikator peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap pengelolaan kearsipan dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai pengawasan kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Berikut daftar SKPD dengan nilai pengawasan kearsipan kategori B :

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal 2025
1	Sekretariat Daerah	63.88
2	Inspektorat	72.42
3	BAPPERIDA	72.38
4	BKPSDM	83.12
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.86
6	Dinas PUPRP	67.79
7	Dinas PMD	60.38
8	Dinas Perhubungan	60.96
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	67.40
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	61.02
11	BPBD	72.33
12	Kecamatan Bajuin	68.28
13	Kecamatan Batu Ampar	64.99
14	Kecamatan Kintap	60.31
15	Kecamatan Tambang Ulang	68.01
16	Kecamatan Bati-Bati	69.75
	Jumlah	872.94
	Nilai Rata-Rata	

KETERANGAN KATEGORI	
> 90 - 100	AA (SANGAT MEMUASKAN)
> 80 - 90	A (MEMUASKAN)
> 70 - 80	BB (SANGAT BAIK)
> 60 -70	B (BAIK)
> 50 - 60	CC (CUKUP)
> 30 - 50	C (KURANG)
> 0 -30	D (SANGAT KURANG)

c. Peningkatan kapasitas SDM kearsipan

1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pada SKPD

Peningkatan kapasitas SDM kearsipan pada Perangkat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kompetensi aparatur pengelola arsip pada SKPD di Kabupaten Tanah Laut. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan guna meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran aparatur dalam menerapkan kaidah pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan standar kearsipan nasional. Kegiatan tersebut antara lain pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Arsip Vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 19 Maret 2025, FGD Pengelolaan Arsip Dinamis yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 26 Maret 2025, serta FGD Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring dan luring pada tanggal 27 November 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib, aman, dan sesuai standar kearsipan.

Kegiatan Focus Group Discussion (Fgd) Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tanggal 19 Maret 2025

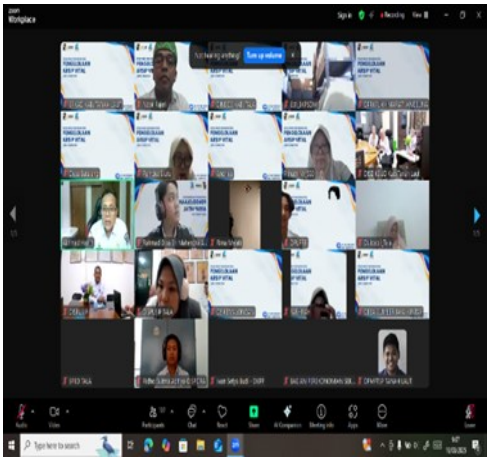

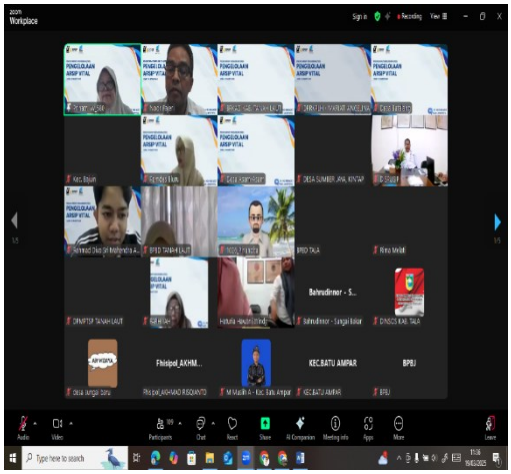

Kegiatan Focus Group Discussion
Pengelolaan Arsip Dinamis Yang Diselenggarakan Secara Daring Melalui *Zoom Meeting* Pada Tanggal 26 Maret 2025

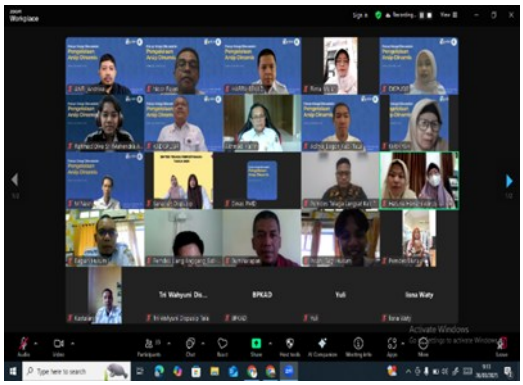

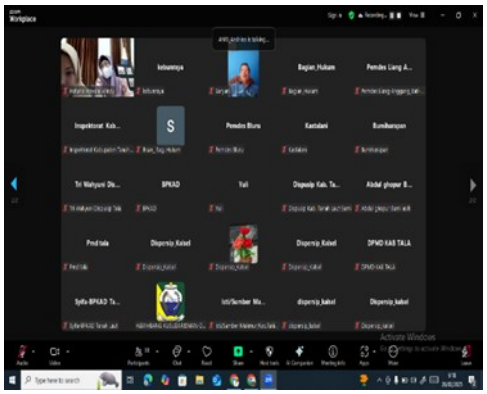

Kegiatan Focus Group Discussion (Fgd) Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Dilaksanakan Secara Online Melalui Zoom Meeting Dan Dan Offline Pada Tanggal 27 November 2025

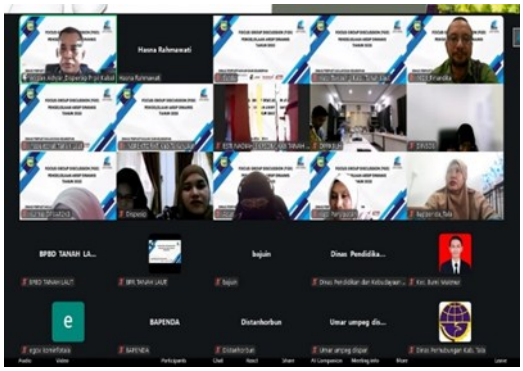

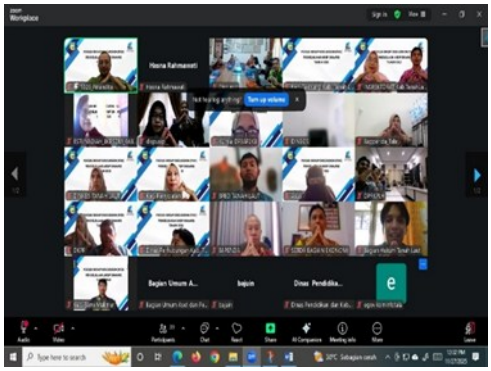

2. Pemerataan arsiparis pada SKPD

Pemerataan arsiparis pada Perangkat Daerah dilakukan sebagai upaya untuk memastikan tersedianya aparatur yang kompeten dan bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan penataan dan pemerataan penugasan arsiparis maupun pengelola arsip guna mendorong pengelolaan arsip yang tertib dan sesuai dengan standar kearsipan. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024 telah disampaikan usulan kebutuhan arsiparis kepada Bagian Organisasi Kelembagaan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, serta pada tahun 2025 diterbitkan surat permintaan pembentukan Tim Pengelola Arsip SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sebagai dasar penguatan pengelolaan kearsipan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Usulan kebutuhan arsiparis kepada Bagian Organisasi Kelembagaan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut

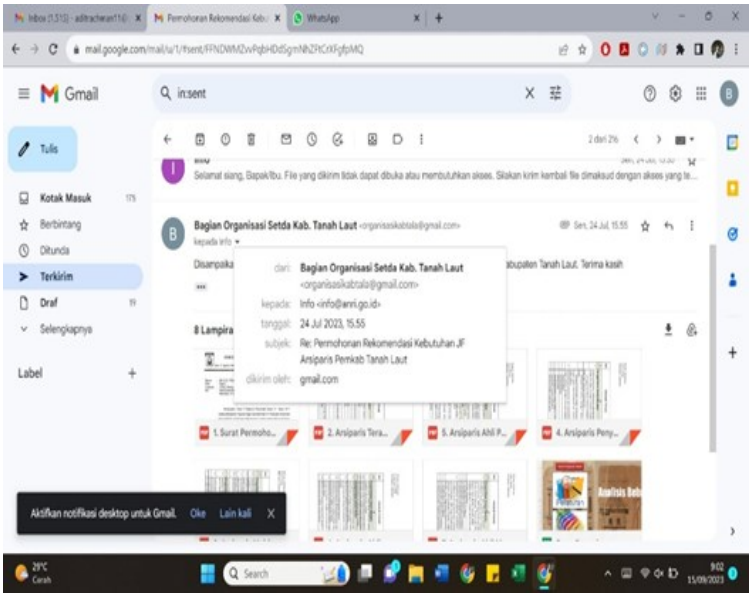

Usulan Pembentukan Tim Pengelola Arsip di SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. A.Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21300 Faks. (0512) 21300

Pelaihari, 9 Mei 2025

Nomor : 000.5.1/39-DISPUSIPI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pembentukan Tim Pengelola Arsip SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Yth. Semua Kepala SKPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
di –
Tempat.

Dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk tertibnya pengelolaan arsip pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka dengan ini diminta kepada semua Kepala SKPD agar mengusulkan ASN/PTT pada SKPD yang dipimpinnya untuk menjadi Kepala Unit Kearsipan (UK) II, Koordinator Unit Kearsipan (UK) II, Kepala Unit Pengolah (UP) dan Anggota Tim Pengelola Arsip SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Sehubungan hal tersebut diatas, diharapkan agar memprioritaskan ASN/PTT yang telah memiliki sertifikat Diklat/Bimtek/Workshop/Sosisalisasi/FGD Kearsipan sebagai Anggota Tim Pengelola Arsip SKPD.

Data ASN/PTT yang diusulkan tersebut sebagaimana contoh terlampir agar disampaikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Up. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan paling lambat tanggal 14 Mei 2025.

Untuk memudahkan koordinasi maka dapat menghubungi kontak person sdri. Jam'ah No.WA 081258373090 dan Rahayu Damayanti No.WA 0813 5101 8270.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ismail Fahmi, SE., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197311281996031008

Tembusan Yth. :
1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. **Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah**

   Adanya dukungan pimpinan daerah dan perangkat daerah, termasuk penandatanganan kebijakan pembentukan Tim Pengelola Arsip SKPD,

menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan kearsipan secara terstruktur dan berkelanjutan.

2. **Peran aktif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pembina kearsipan**

   Pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi kearsipan secara rutin kepada SKPD dan kecamatan mendorong peningkatan pemahaman dan kepatuhan dalam pengelolaan arsip sesuai standar nasional.

3. **Peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui kegiatan terarah**

   Kegiatan FGD dan pembelajaran kearsipan, baik secara daring maupun luring, telah meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pengelolaan arsip vital, arsip dinamis, serta penerapan kaidah kearsipan yang benar.

4. **Pemanfaatan sistem dan aplikasi kearsipan nasional**

   Implementasi aplikasi SRIKANDI dan SIJKN serta kegiatan alih media arsip mendukung tertib arsip dan meningkatkan keamanan serta kemudahan akses arsip daerah.

5. **Kondisi wilayah yang aman dari bencana kearsipan pada tahun berjalan**

   Tidak terjadinya bencana yang berdampak pada arsip daerah memungkinkan perangkat daerah fokus pada penataan arsip, penilaian, dan pemusnahan arsip sesuai ketentuan tanpa harus melakukan pemulihan arsip pascabencana.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. **Keterbatasan jumlah dan pemerataan arsiparis pada SKPD dan kecamatan**

   Belum seluruh perangkat daerah memiliki arsiparis atau pengelola arsip yang kompeten sehingga kualitas pengelolaan arsip belum merata.

2. **Perbedaan tingkat pemahaman dan kepedulian aparatur terhadap kearsipan**

   Masih terdapat aparatur yang memandang kearsipan sebagai tugas administratif semata, bukan sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan.

3. **Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kearsipan**

Sebagian perangkat daerah belum secara konsisten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, baik dari internal maupun eksternal.

4. **Pengelolaan arsip dinamis yang belum sepenuhnya sesuai standar**
   Penyusunan daftar arsip, penerapan klasifikasi, dan jadwal retensi arsip belum dilaksanakan secara seragam pada seluruh perangkat daerah.
5. **Pemanfaatan teknologi kearsipan yang belum maksimal**
   Penggunaan aplikasi kearsipan digital masih belum optimal, baik dari sisi konsistensi pemanfaatan maupun kelengkapan data yang diinput.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. **Penguatan pembinaan dan pendampingan kearsipan secara berkelanjutan**
   Melaksanakan pembinaan, asistensi, dan konsultasi teknis secara rutin kepada seluruh SKPD dan kecamatan untuk memastikan penerapan standar kearsipan berjalan konsisten.
2. **Percepatan pemerataan arsiparis dan pengelola arsip pada perangkat daerah**
   Mendorong penataan dan penugasan arsiparis serta pengelola arsip melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan peran Tim Pengelola Arsip SKPD.
3. **Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi pengawasan kearsipan**
   Melaksanakan monev secara terintegrasi dengan kegiatan pembinaan serta memantau secara periodik tindak lanjut rekomendasi pengawasan kearsipan.
4. **Optimalisasi digitalisasi dan pemanfaatan aplikasi kearsipan**
   Meningkatkan pendampingan penggunaan aplikasi SRIKANDI dan SIJKN serta memperluas kegiatan alih media arsip untuk menjamin keamanan dan aksesibilitas arsip.
5. **Penguatan budaya tertib arsip di lingkungan perangkat daerah**
   Menumbuhkan kesadaran dan komitmen aparatur melalui sosialisasi berkelanjutan agar pengelolaan arsip menjadi bagian dari budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dan Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 47 ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 177.820.944,68 dan terealisasi Rp. 135.915.700,00 atau sebesar 76,43%.

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Program Pengelolaan Arsip	117.576.959,68	104.782.500,00
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	60.243.985,00	31.133.200,00
JUMLAH			177.820.944,68	135.915.700,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(177.820.944,68 \times 100,76\%) - 135.915.700,00}{(177.820.944,68 \times 100,76\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 24,14%

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 2

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,76%	76,43%	24,14%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, total belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditetapkan sebesar Rp9.968.328.528,93. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp7.663.913.493,47 yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta Belanja Modal sebesar Rp2.304.415.035,46 yang diarahkan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan.

Sehubungan dengan tidak dialokasikannya pendapatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, maka struktur anggaran mengalami defisit sebesar Rp9.968.328.528,93. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

TUJUAN I

Tabel 3.6

Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Anggaran	Realiasasi	Persentase
								Rp	Rp	%
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			1	Program Pembinaan Perpustakaan	2.743.181.812,56	416.080.434,00	15,2%
						2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	70.877.578,00	0,00	0%
								2.814.059.390,56	416.080.434,00	14,8%
2	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	1	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	81,50	82,12	1	Program Pengelolaan Arsip	117.576.959,68	104.782.500,00	89%
						2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	60.243.985,00	31.133.200,00	51,7%
								236,137,535,102	135.915.700,00	76,4%

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**9.968.328.528,93**	**6.199.495.963,00**	**62,19**	**6.822.306.642,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.663.913.493,47**	**6.070.103.679,00**	**79,20**	**5.945.172.922,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.379.279.885,00	4.326.959.378,00	80,44	3.749.190.860,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.284.633.608,47	1.743.144.301,00	76,30	2.195.982.062,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**7.663.913.493,47**	**6.070.103.679,00**	**79,20**	**5.945.172.922,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.304.415.035,46**	**129.392.284,00**	**5,61**	**877.133.720,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.385.035,46	129.392.284,00	43,66	797.233.720,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.008.030.000,00	0,00	0,00	79.900.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2.304.415.035,46**	**129.392.284,00**	**5,61**	**877.133.720,00**
	JUMLAH BELANJA	**9.968.328.528,93**	**6.199.495.963,00**	**62,19**	**6.822.306.642,00**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**	**9.968.328.528,93**	**6.199.495.963,00**	**6.822.306.642,00**	**(9,13%)**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.663.913.493,47**	**6.070.103.679,00**	**5.945.172.922,00**	**2,10%**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.379.279.885,00	4.326.959.378,00	3.749.190.860,00	**15,41%**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.284.633.608,47	1.743.144.301,00	2.195.982.062,00	**(20,62%)**
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**7.663.913.493,47**	**6.070.103.679,00**	**5.945.172.922,00**	**2,10%**
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.304.415.035,46**	**129.392.284,00**	**877.133.720,00**	**(85,25%)**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.385.035,46	129.392.284,00	797.233.720,00	**(83,77%)**
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.008.030.000,00	0,00	79.900.000,00	**(100,00%)**
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2.304.415.035,46**	**129.392.284,00**	**877.133.720,00**	**(85,25%)**
	JUMLAH BELANJA	**9.968.328.528,93**	**6.199.495.963,00**	**6.822.306.642,00**	**(9,13%)**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah **88,84%** dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 76. Namun pada Tahun 2025 pada 1 indikator Kinerja Utama terjadi perubahan kebijakan pengukuran yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan tersebut mencakup penggunaan instrumen dan metodologi terbaru, sekaligus penyesuaian istilah dari Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) menjadi Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Dengan adanya perubahan metode pengukuran tersebut, hasil pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan metode lama. Oleh karena itu, penurunan angka realisasi pada Tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh perubahan instrumen dan pendekatan pengukuran.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. **Penguatan keterkaitan perencanaan dan penganggaran**, dengan memastikan bahwa alokasi belanja program dan kegiatan secara konsisten mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah selama periode 2025–2029 sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
2. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala**, melalui pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP setiap triwulan sebagai instrumen

pengendalian dan evaluasi kinerja, serta sebagai dasar perbaikan dan penetapan target indikator kinerja pada periode selanjutnya.

3. **Peningkatan kualitas pengawasan dan kompetensi profesional aparatur**, melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kaji tiru, serta mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan, pengawasan, dan auditing, guna mendukung penyelesaian temuan serta peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah.
4. **Peningkatan kualitas pelaporan kinerja**, dengan menyajikan informasi kinerja SKPD yang lebih akurat, transparan, dan informatif, sehingga mampu menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan secara komprehensif.
5. **Penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment)** kepada SKPD berdasarkan capaian kinerja organisasi, sebagai bentuk penguatan komitmen dan motivasi dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. **Penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah**, guna memastikan keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendorong pencapaian kinerja yang terintegrasi dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. **Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja**, termasuk optimalisasi aplikasi pendukung SAKIP dan sistem informasi lainnya, guna meningkatkan efektivitas pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
8. **Peningkatan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca**, melalui penguatan program pembudayaan kegemaran membaca yang berkelanjutan, antara lain dengan perluasan layanan perpustakaan keliling, peningkatan kualitas dan variasi koleksi bacaan, penguatan peran taman bacaan masyarakat dan komunitas literasi, serta optimalisasi kegiatan literasi kreatif dan promosi membaca berbasis kolaborasi dengan satuan pendidikan dan media.
9. **Peningkatan Nilai Pengawasan Kearsipan**, melalui penguatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah, desa, dan lembaga pendidikan, peningkatan kepatuhan terhadap

standar kearsipan, serta mendorong tertib pengelolaan arsip dinamis dan statis guna meningkatkan hasil pengawasan kearsipan secara berkelanjutan.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanah Laut

SAFARIN, S.IP, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690426 199010 1 001

LAMPIRAN

DAFTAR CAPAIN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**								
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyara	73.17	Nilai	56.29	Nilai	76.93%		
	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	81.5	Nilai	82.12	Nilai	100.76%		
2	**Sekretaris**								
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100	Persen	87.08	Persen	87.08%		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.1	NIlai	82.45	NIlai	101.66%		
3	**Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca**								
	Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan Meningkatnya Komunitas Baca masyarakat	Persentase peningkatan komunitas baca masyarakat	20	Persen	20	Persen	100.00%		

4	**Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan**							
	Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan Meningkatnya Komunitas Baca masyarakat	Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka	25	Persen	28	Persen	112.00%	
	Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka	25	Persen	28	Persen	112.00%	
5	**Kepala Bidang Penyelangaraan Kearsipan**							
	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah Meningkatnya kapasitas SDM Kearsipan	Persentase SDM Kearsipan yang ditingkatkan	50	Persen	100	Persen	200.00%	
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kepatuhan kearsipan minimal B	50	Persen	40	Persen	80.00%	
	Terwujudnya Keamanan arsip daerah	Persentase arsip yang aman	100	Arsip	100	Arsip	100.00%	
6	**Kasubbag Perencanaan dan Keuangan**							
	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100	persen	91.67	persen	91.67%	
	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	persen	91.67	persen	91.67%	
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	7	Dokumen	7	Dokumen	100.00%	
	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	6	Laporan	100.00%	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang/ Bulan	27	Orang/ Bulan	93.10%	

7	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian							
	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	88.89	Persen	88.89%	
	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Layanan Admnistrasi umum	100	persen	83.89	persen	83.89%	
	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	83.89	Persen	83.89%	
	Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48	paket	48	paket	100.00%	
	Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	orang	24	orang	100.00%	
	Terlaksananya penyediaan barang pakai habis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	paket	100.00%	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	paket	3	paket	100.00%	
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	24	Laporan	100.00%	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	240	dokumen	240	dokumen	100.00%	
	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor, komunikasi, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	2	Laporan	100.00%	

8	Kasubbag Umum dan Perlengkapan							
	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	78.89	Persen	78.89%	
	Terlaksananya penyediaan barang pakai habis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	100.00%	
	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	paket	10	paket	100.00%	
	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	paket	2	paket	100.00%	
	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor, komunikasi, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100.00%	
	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	1	unit	100.00%	
	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	10	unit	100.00%	
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan , mesin, gedung, serta sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	unit	24	unit	100.00%	

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629
Website : https.//dispusip.tanahlautkab.go.id
e-mail : dispusiptala2020@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAFARIN, S.IP, M.SI

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	SAFARIN, S.IP, M.SI NIP 196904261990101001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran		
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,17 Indeks
2	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	81,5 Nilai
3	-	-	-

	Program	Anggaran
	Program	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	2.743.181.812
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	70.877.578
3	Program Pengelolaan Arsip	117.576.959
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	60.243.895
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.976.448.283

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

H. RAHMAT TRIANTO

PIHAK PERTAMA

SAFARIN, S.IP, M.SI
NIP 196904261990101001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629
Website : https://dispusip.tanahlautkab.go.id
e-mail : dispusiptala2020@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INA GANTIANI, S.IP., M.M

Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SAFARIN, S.IP, M.SI

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SAFARIN, S.IP, M.SI	INA GANTIANI, S.IP., M.M
NIP 196904261990101001	NIP 197111221991032004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,1 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen

	Program	Anggaran
	Program	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.976.448.283

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TANAH LAUT

Safarin, S.IP, M.Si
NIP 196904261990101001

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

INA GANTIANI, S.IP., M.M
NIP 197111221991032004

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629
Website : https://dispusip.tanahlautkab.go.id
e-mail : dispusiptala2020@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAMSURI, S.PD

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SAFARIN, S.IP, M.SI

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	ERTAMA
SAFARIN, S.IP, M.SI	SYAMSURI, S.PD
NIP 196904261990101001	NIP 196803191988031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan (PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN)	Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka	25 %
2	Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan (PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO)	Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka	25 %
3	Meningkatnya pemerataan layanan perpustakaan (Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Kecamatan yang mendapatkan layanan perpustakaan minimal 10x dalam 1 tahun	25 %
4	Meningkatnya kualitas perpustakaan (Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi	1 Jumlah
5	meningkatnya pembinaan perpustakaan pada sekolah dan desa (Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan)	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	33 perpustakaan
6	Terlaksananya layanan perpustakaan di kecamatan (Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota)	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan
7	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga	40 Orang

	(Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
8	Tersedianya Koleksi bahan perpustakaan cetak dan digital (Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan)	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10.973 Eksemplar
9	Tersedianya Koleksi bahan perpustakaan cetak dan digital (Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno)	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	27 Orang
10	Tersedianya Koleksi bahan perpustakaan cetak dan digital (Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan)	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	**Anggaran**
	Kegiatan	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.448.937.609
2	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	70.877.578
	Sub Kegiatan	
3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	78.169.667
4	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	234.548.817
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.720.102
6	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	2.065.499.023
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	13.265.718

8	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	57.611.860
	Program	
9	Program Pembinaan Perpustakaan	2.448.937.609
10	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	70.877.578

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TANAH LAUT

SAFARIN, S.IP, M.SI
NIP 196904261990101001

Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

SYAMSURI, S.PD
NIP 196803191988031004

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629
Website : https.//dispusip.tanahlautkab.go.id
e-mail : dispusiptala2020@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAHRIYANUR, S.STP, M.SI

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SAFARIN, S.IP, M.SI

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SAFARIN, S.IP, M.SI	SAHRIYANUR, S.STP, M.SI
NIP 196904261990101001	NIP 198208232000121004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah (PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kepatuhan kearsipan minimal B	50 %
	Meningkatnya kapasitas SDM kearsipan OPD	Persentase SDM Kearsipan yang ditingkatkan	50 %
2	Terwujudnya Keamanan arsip daerah (PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP)	Persentase arsip yang aman	100 %
3	- (Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan arsipnya sesuai standar	50 %
4	- (Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase arsip statis yang dikelola	100 %
5	- (Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota)	Tingkat digitalisasi arsip	76 Nilai
6	- (Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun)	Jumlah arsip yang dimusnahkan	500 Arsip
7	- (Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota)	Jumlah arsip akibat bencana yang dilindungi dan diselamatkan	50 Arsip
8	- (Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan yang didata dan dinilai	2.000 Arsip

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan)		
9	Terlaksananya pengawasan kearsipan Perangkat Daerah (Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan
10	terlaksananya akuisisi pengolahan preservasi dan akses arsip statis (Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis)	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1.000 Arsip
11	terlaksananya layanan informasi kearsipan melalui JIKN (Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan
12	- (Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun)	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip
13	terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana (Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana)	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip
14	terlaksananya pendataan dan penilaian arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan (Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar
15	- (Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi	400 Arsip

	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)	Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
16	- (Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan)	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	500 Arsip

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	21.467.561
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	49.606.513
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	46.502.885
4	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	13.736.496
5	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	7.215.000
6	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	39.292.399
	Sub Kegiatan	
7	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21.467.561
8	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	49.606.513
9	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	46.502.885
10	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	13.736.496
11	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	7.215.000
12	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	15.900.000
13	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.872.536
14	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	8.519.863
	Program	
15	Program Pengelolaan Arsip	117.576.959
16	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	60.243.895

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TANAH LAUT	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
SAFARIN, S.IP, M.SI	SAHRIYANUR, S.STP, M.SI
NIP 196904261990101001	NIP 198203232000121004

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629
Website : https://dispusip.tanahlautkab.go.id
e-mail : dispusiptala2020@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADITYA NUGRAHA, S.H

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SAFARIN, S.IP, M.SI

Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SAFARIN, S.IP, M.SI	ADITYA NUGRAHA, S.H
NIP 196904261990101001	NIP 198103072008030 1

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Komunitas Baca masyarakat (PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN)	Persentase peningkatan komunitas baca masyarakat	20 Persen
2	Meningkatnya durasi membaca masyarakat (Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Tingkat durasi membaca masyarakat	61,96 Nilai
3	Terlaksananya layanan inklusi sosial (Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial)	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan
4	Meningkatnya frekuensi dan durasi akses internet sebagai bahan bacaan masyarakat (Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang
5	Meningkatnya bahan bacaan masyarakat (Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat)	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	44 Lokus

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	294.244.203
	Sub Kegiatan	
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	138.015.674

3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	42.017.389
4	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	114.211.140
	Program	
5	Program Pembinaan Perpustakaan	294.244.203

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TANAH LAUT

SAFARIN, S.IP, M.SI
NIP 196904261990101001

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

ADITYA NUGRAHA, S.H
NIP 1981030720080301

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629
Website : https.//dispusip.tanahlautkab.go.id
e-mail : dispusiptala2020@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARMAN, S.ST

Jabatan : Kasubbag Umum dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : INA GANTIANI, S.IP., M.M

Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
IN[illegible] S.IP., M.M	ARMAN, S.ST
NIP [illegible] 1991032004	NIP 197306082007011017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase layanan administrasi Umum perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
3	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
4	Terlaksananya penyediaan barang pakai habis (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
5	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
6	Tersedianya peralatan rumah tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
7	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor, komunikasi, air dan listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

8	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
9	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit
10	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan , mesin, gedung, serta sarana dan prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.988.273
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.450.000
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.338.500
	Sub Kegiatan	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.516.025
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.571.339
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.900.909
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.450.000
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.496.000

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629
Website : https.//dispusip.tanahlautkab.go.id
e-mail : dispusiptala2020@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENNY SUSILAWATI, S.M

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : INA GANTIANI, S.IP., M.M

Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
INA GANTIANI, S.IP., M.M	ENNY SUSILAWATI, S.M
NIP. 197111221991032004	NIP 198201252009012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %
3	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	7
4	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.252.282
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.379.279.885
	Sub Kegiatan	

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.870.886
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.381.396
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.379.279.885

TANAH LAUT, 02 September 2025

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TANAH LAUT

INA GANTIANI, S.IP., M.M
NIP 197111221991032004

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

ENNY SUSILAWATI, S.M
NIP 198201252009012001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629
Website : https.//dispusip.tanahlautkab.go.id
e-mail : dispusiptala2020@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANIL SADIKIN, S. KOM

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : INA GANTIANI, S.IP., M.M

Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
INA GANTIANI, S.IP., M.M	HANIL SADIKIN, S. KOM
NIP 197111221991032004	NIP 198909292011011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Admnistrasi Umum	100 %
3	Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
4	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket
5	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang
6	Terlaksananya penyediaan barang pakai habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
7	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
8	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

	(Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)		
9	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	240 Dokumen
10	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor, komunikasi, air dan listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.648.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.805.123
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.886.220
	Sub Kegiatan	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.648.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.446.067
6	Penyediaan Bahan/Material	17.944.835
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.074.940
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.139.281
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	670.886.220

TANAH LAUT, 02 September 2025

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TANAH LAUT

INA GANTIANI, S.IP., M.M
NIP 197111221991032004

Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

HANIL SADIKIN, S. KOM
NIP 198909292011011002

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. A. Syairani Komp.Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 E-mail : Dispusiptala2020@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 800.1.5.1/ 02 -DISPUSIP/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama meliputi :
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten.

KETIGA : Susunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk:

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KELIMA : Inspektorat Kabupaten wajib:
a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal yang di tetapkan

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, 03 Februari 2025

a. n Bupati Tanah Laut
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Safarin, S.IP,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690426 199010 1 010

Lampiran	:	Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupa Tanah Laut
Nomor	:	800.1.5.1/ 02 DISPUSIP/2025
Tanggal	:	03 Februari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten	:	Tanah Laut
Nama SKPD	:	Dinas Perpustakaan Kearsipan
Fungsi	:	Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perpustakaan, bidang kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Tugas	:	a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; d. Pelaksanaan administrasi dinas; e. Pembinaan UPT Dinas; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Perhitungan hasil Kajian seperti rumus di bawah ini : TGM = (0,3 x TFM + 0,3 x TDM + 0,3 x TJB) + (0,05 x FAI + 0,05 x DAI) TFM =FrekuensiMembaca TDM = Durasi Membaca TJB = Jumlah Buku Dibaca FAI = Frekuensi Akses Internet DAI = Durasi Akses Internet	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Da
2	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai pengawasan eksternal x 60 % + Nilai pengawasan internal x 40%	Bidang Penyelenggaraan Kearsipa

a.n Bupati Tanah Laut
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Safarin, S.IP,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690426 199010 1 010

RENCANA AKSI
Dinas Perpustakaan dan kearsipan
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	81.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81.1													81.1	
		% Kepuasan Pengawai pada Layanan internal perangkat daerah	%	100			Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100				25%			25%			25%			25%	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100			0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		7	4,870,886	1,217,723.00		3	1,217,721.00		2	1,217,721.00		1	1,217,721.00		1	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	4,999,503	1,249,878.00		3	1,249,875.00		7	1,249,875.00		3	1,249,875.00		4	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100			0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	5,379,279,885	1,344,819,971.00		27	1,344,819,971.00		27	1,344,819,971.00		27	1,344,819,972.00		27	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100			0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48	18,648,000	4,662,000.00		12	4,662,000.00		12	4,662,000.00		12	4,662,000.00		12	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	120,000,000	-		-	-		-	-		-	120,000,000.00		25	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100			0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11,516,025	11,516,025.00		1	-		-	-		-	-		-	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	82,795,098	20,698,776.00		1	20,698,774.00		1	20,698,774.00		3	20,698,774.00		2	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	14,900,909	7,450,455.00		1	7,450,454.00		1	-		-	-		-	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19,999,520	4,999,880.00		1	4,999,880.00		1	4,999,880.00		1	4,999,880.00		1	
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	15,000,000	3,750,000.00		0	3,750,000.00		0	3,750,000.00		0	3,750,000.00		2	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	149,963,960	37,490,990.00		6	37,490,990.00		6	37,490,990.00		6	37,490,990.00		6	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	240	2,139,281	534,821.00		60	534,820.00		60	534,820.00		60	534,820.00		60	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100			0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	241,000,000	60,250,000.00		3	60,250,000.00		3	60,250,000.00		3	60,250,000.00		3	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	670,886,220	167,721,555.00		-	167,721,555.00		-	167,721,555.00		-	167,721,555.00		2	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100			0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37,496,000	9,374,000.00		1	9,374,000.00		1	9,374,000.00		1	9,374,000.00		1	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	164,987,500	41,246,875.00		10	41,246,875.00		10	41,246,875.00		10	41,246,875.00		10	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	19,860,000	4,965,000.00		6	4,965,000.00		6	4,965,000.00		6	4,965,000.00		6	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	73.17	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase peningkatan komunitas baca masyarakat	Persen	20													20%	
							Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka	Persen	25													25%	
						Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mendapatkan layanan perpustakaan minimal 10x dalam 1 tahun	Persen	25			0%			0%			0%			0%	25%	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	33	78,269,667	39,134,834.00		15	39,134,833.00		18	-		-	-		-	
						Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan	2	234,531,916	58,632,979.00		-	58,632,979.00		-	58,632,979.00		1	58,632,979.00		1	
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	40	70,720,102	-			70,720,102.00		40	-			-			
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	10973	70,458,517	-			-			-			70,458,517.00		10973	
						Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat durasi membaca masyarakat	Nilai	25			0%			0%			0%			0%	25	
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	3	100,227,900	-			-			-			100,227,900.00		3	
						Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	12	9,271,920	2,317,980.00		4	2,317,980.00		4	2,317,980.00		4	2,317,980.00		4	
						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	44	88,451,080	-			-			-			88,451,080.00		44	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	73.17	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase peningkatan Kunjungan pemustaka	Persen	25													25%	
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah	1		-	0%		-	0%		-	0%			0%	1	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	27	19,548,881	-			-			-			19,548,881.00		27	
						Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1	22,910,793	-			-			-			22,910,793.00		1	
	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	81.5	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kepatuhan kearsipan minimal B	Persen	50														50%	
							Persentase SDM Kearsipan yang ditingkatkan	Persen	50														50%	
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang pengelolaan arsipnya sesuai standar	Persen	50		-	0%		-	0%		-	0%			0%	50%	
						Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	21,467,561	-			-			-			21,467,561.00		1	
						Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola	Persen	100			0%	25%		0%	25%		0%	25%		0%	25%	
						Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1000	49,785,592	12,446,398.00		500	12,446,398.00		500	12,446,398.00		500	12,446,398.00		500	
						Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat digitalisasi arsip	Nilai	76		23,251,443	0%		-	0%		-	0%			0%	76	
						Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	46,502,885	23,251,443.00		2	-		-	-		-	23,251,442.00		1	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	73.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase arsip yang aman	Persen	100				25%			25%			25%			25%	
						Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan	Arsip	500		-	0%		-	0%		-	0%			0%	500	
						Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	500	13,736,496	-			-			-			13,736,496.00		500	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
						Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip akibat bencana yang dilindungi dan diselamatkan	Arsip	100	-		0%			0%			0%			0%	50	
						Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	50	7,215,000	-			-			-			7,215,000.00		50	
						Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan yang didata dan dinilai	Arsip	2000	-		0%			0%			0%			0%	2000	
						Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	1	15,900,000	-			-			-			15,900,000.00		1	
						Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	400	14,872,536	-			-			-			14,872,536.00		400	
						Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip	500	8,519,863	-			-			-			8,519,863.00		500	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
						Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	46,502,885	23,251,443.00		2	-		-	-		-	23,251,442.00		1	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	73.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase arsip yang aman	Persen	100				25%			25%			25%			25%	
						Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan	Arsip	500		-	0%		-	0%		-	0%			0%	500	
						Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	500	13,736,496	-			-			-			13,736,496.00		500	
						Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip akibat bencana yang dilindungi dan diselamatkan	Arsip	100	-		0%			0%			0%			0%	50	
						Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	50	7,215,000	-			-			-			7,215,000.00		50	
						Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan yang didata dan dinilai	Arsip	2000	-		0%			0%			0%			0%	2000	
						Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	1	15,900,000	-			-			-			15,900,000.00		1	
						Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	400	14,872,536	-			-			-			14,872,536.00		400	
						Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip	500	8,519,863	-			-			-			8,519,863.00		500	

Pelaihari, 06 Januari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Saparin, S.IP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19680426 198010 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com Laman
https://inspektorat.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/234/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanah Laut
di
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum**
   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. **Tujuan Evaluasi**
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. **Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. **Hasil evaluasi**

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/312/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025 Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).

2	A	> 80 – 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 82,45 dengan predikat **"A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan".**

Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan terwujudnya gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	**Bobot**	**Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024**	**Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025**
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,60	24,60
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	12,75
d. Evaluasi Internal	25,00	20,50	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		81,10	82,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

5. **Catatan Hasil evaluasi**

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesr **30,00**.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan yaitu:

1) Penentuan target pada dokumen perencanaan tidak menantang, kenaikan target tiap tahun kecil dan ada penentuan target tahun 2025 yang sama dengan realisasi tahun 2024, dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2024	Target 2025	Renstra 2026-2030				
					TARGET				
					2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	70.38	70.38	70.43	70.48	70.53	70.58	70.63
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,07	73,17	73,27	73,37	73,47	73,57	73,67
	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	80.45	81	83	85	87	90	91
		Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	81,03	81,50	81,75	82,00	82,50	82,75	83,00

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan hanya berupa simbol "jempol" belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.

2. Dokumen pengukuran kinerja belum cukup membuktikan telah dinilai secara berkala karena tidak ada pemantauan realisasi kinerja tiap triwulan untuk eselon II dan eselon III dan tidak ada bukti dukung data untuk memperoleh nilai target yang ingin dicapai sesuai definisi operasional yang ada seperti nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan persentase sasaran perangkat daerah yang memenuhi target pada Eselon II dengan disertai dokumen rekap jumlah TFM (frekuensi membaca), TDM (durasi membaca), TJB (jumlah buku dibaca), FAI (frekuensi akses internet) dan DAI (durasi akses internet) pertriwulan sebagai perhitungan untuk Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Sehingga pengukuran kinerja dapat dievaluasi setiap triwulan.

3. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja karena didalam dokumen Renja Perubahan 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak ada analisa terkait alasan pengurangan/penambahan target indikator. Misal perubahan indikator pada subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan bahan Perpustakaan yaitu jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan sebelum perubahan sebanyak 10.973 eksemplar diperubahan menjadi 1.500 eksemplar diberikan analisa mengapa perlu dikurangi target indikatornya tersebut sesuai hasil pengukuran kinerja di triwulan I dan II tahun 2025.

4. Pengukuran kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja karena dalam dokumen renja perubahan tahun 2025 Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tidak ada menarasikan capaian kinerja berkala yang belum tercapai dan menjadikannya dasar dalam menentukan perubahan anggaran .

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
2) Target pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 tidak berdasarkan informasi dalam laporan kinerja tahun sebelumnya, yaitu pada Laporan Kinerja tahun 2024 indikator jumlah kunjungan pemustaka realisasi 9013 orang, namun pada target PK tahun 2025 hanya 6000 orang.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas Rencana Aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan;
b. Melakukan pemantauan SKP bulanan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik *(feedback)* dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.
c. Pengukuran kinerja agar dipantau realisasinya setiap triwulan dan diperhitungkan sesuai data dukung yang memadai agar dapat dievaluasi secara berkala khususnya untuk eselon II dan eselon III.
d. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian kinerja tahun 2025 dan renstra tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian *output/outcome* kinerja perangkat daerah.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan yaitu adanya kenaikan target indikator perencanaan kinerja pada renstra 2024-2026 dengan mempertimbangkan lagi keseluruhan kriteria SMART yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevance, dan Timebound* sebagaimana yang terdapat pada tabel TC. 25.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Rw[illegible]i,ST, CGCAE
Pembi[illegible]
NIP. 1[illegible]200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

Lampiran I

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,20
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,75
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	A	4,05
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	6,00

4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		20,50
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,50
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6,00
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				82,45
KESIMPULAN				A
INTERPRESTASI				Memuaskan

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Lampiran II

Dokumen yang menjadi perhatian:

1. Perencanaan Kinerja

a. Renstra 2024-2026

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan /Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/ Sasara ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	20	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(	
1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah					
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah					
		Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,73	57,73	57,73	58	60
			Indeks Pembudayaan kegemaran Membaca	72.54	72.54	72.54	75	77

Target 2024 sama dengan realisasi tahun 2022 dan kenaikan target tiap tahunnya sangat kecil dan kurang menantang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan /Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	61	61.5	62	62.5	63
		Nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70.3	80.01	82	83	83

b. Rancangan Akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	70.38	70.38	70.43	70.48	70.53	70.58	70.63	
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	73,07	73,17	73,27	73,37	73,47	73,57	73,67	
		Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	80,45	81	83	85	87	90	91	
Peraturan Arsi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan			Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	81,03	81,50	81,75	82,00	82,50	82,75	83,00	

Ada beberapa target kinerja pada dokumen perencanaan tidak menantang, kenaikan target tiap tahun kecil bahkan target tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja (SKP Pegawai)

PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE JUNI

PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT — PERIODE PENILAIAN: 1 JUNI SD 30 JUNI TAHUN 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SAFARIN, S.IP., M.Si	1	NAMA	[illegible], S.E., MT
2	NIP	[illegible]	2	NIP	[illegible]
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c
4	JABATAN	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	JABATAN	PJ. Sekretaris Daerah
5	UNIT KERJA	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI MENGARAHKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK MEREKLARUTAN MENGARAHKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UTAMA						
1	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,38	Pengguna Internal	1 berdasarkan draf	Pengisian
2	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Indeks Kegemaran Membaca	73,07	Pengguna Internal	1 berdasarkan draf	Pengisian
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	81,03	Pemangku Internal	1 berdasarkan draf	Pengisian
4	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,10	Pengguna Internal	1 berdasarkan draf	Pengisian
TAMBAHAN						
RATING HASIL KERJA						

Umpan balik yang di rekomendasikan berupa narasi yang membangun

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

CAPAIAN IKU ESELON II

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Realisasi					Capaian Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi Tahun 2024 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10/12	14
1	Meningkatnya Pembangunan literasi dan kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,71	71,75	0	0	0	70,53	70,53	111%	57,75	122%	Kepala Dinas
		Indeks pembiasaan kegemaran membaca	73	72,54	0	0	0	73,08	73,08	101%	72,54	101%	
3	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan kearsipan	63,70; 57,80	62	0	0	0	81,03	81,03	131%	62	131%	Kepala Dinas
4	Nilai Akip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai akip Dinas Perpustakaan dan kearsipan	0	82	0	0	0	0	0	0%	82	0%	Kepala Dinas

CAPAIAN IKU ES12ELON III

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Realisasi					Capaian Tahun ini	Target Akhir Renstra	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10/12	14
1	Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel	Nilai konsepsi perencanaan	0	24	0	0	0	0	0	0%	0	0	Sekretaris
		Nilai konsepsi pengadaan	0	24	0	0	0	0	0	0%	0	0	Sekretaris
		Nilai konsepsi pelaporan	0	12	0	0	0	0	0	0%	0	0	Sekretaris
		Nilai konsepsi evaluasi internal	0	20	0	0	0	0	0	0%	0	0	Sekretaris
		Nilai Survey Pelayanan kesekretariatan	0	90	80,37	80,37	80,37	77,87	77,87	86%	77,87	86%	Sekretaris
2	Meningkatnya kunjungan perpustakaan perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustaka	0	4000	1000	1555	5412	8013	8013	225%	8013	225%	Kepala [illegible]
3	Meningkatnya literasi masyarakat dan rumah baca yang di kunjungi	Jumlah rumah baca yang di miliki	0	1	0	0	1	0	1	100%	1	100%	Kepala [illegible]
4	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan kearsipan pada	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kepatuhan kearsipan minimal B	0	15	0	0	0	32,50	32,50	210%	25	210%	Kepala Bidang Penyelenggaraan Arsip

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
CAPAIAN IKU ESELON II

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Realisasi					Capaian Tahun 2025	Target akhir Renstra	Capaian IKU terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	122%	78,17	0	0	0	0	0	0%	0	0%	Kepala Dinas
2	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Nilai Pengelolaan Kearsipan	131%	81,50	0	0	0	0	0	0%	0	0%	Kepala Dinas

Capian tiwulanan agar diisi dan diperhitungkan sesuai data dukung agar dapat dipantau secara berkala

CAPAIAN IKU ESELON III

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	REALISASI					Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(10/12)	14
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10	81,10	0	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretaris
		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	77,07	100	0	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretaris
2	Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan	% peningkatan Kunjungan pemustaka	100%	25%	0	0	0	0	0	0%	25%	0%	Kabid Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
	Meningkatnya komunitas baca masyarakat	% peningkatan komunitas baca masyarakat	0%	20%	0	0	0	0	0	0%	35%	0%	Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
3	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah	% Perangkat Daerah dengan nilai kepatuhan kearsipan minimal B	100%	50%	0	0	0	0	0	0%	90%	0%	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsip
4	Terwujudnya Keamanan arsip daerah	% arsip yang aman	100%	100%	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsip

3. Pelaporan Kinerja

Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Jumlah Kunjungan Pemustaka	Orang	4000	9013	225%
Meningkatnya koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestarikan	Jumlah Naskah kuno yang di miliki	eksemplar	1	1	100%
	Rata rata Capaian				162%

Sumber : Bidang Perpustakaan

Jumlah kunjungan Pemustaka tahun 2024 sebanyak 9013 orang dengan capaian 225%, namun target ditahun 2025 pada PK hanya 6000 orang.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512) 232629

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Meningkatnya kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Jumlah Kunjungan pemustaka	6000 orang
2	Meningkatnya koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestarikan	Jumlah Naskah kuno yang di miliki	1 eksemplar

4. Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024

4. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menunjukkan nilai sebesar **81,10 (delapan puluh satu koma sepuluh)** atau dengan predikat **"A"**. **Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan",** yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

5. Rekomendasi LHE tahun sebelumnya

6. Rekomendasi

Berdasarkan temuan/catatan di atas, dalam rangka implementasi akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan pada komponen perencanaan kinerja, yaitu dalam mencantumkan target indikator perencanaan kinerja lebih mempertimbangkan lagi keseluruhan kriteria SMART yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevance, dan Timebound.*

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009